

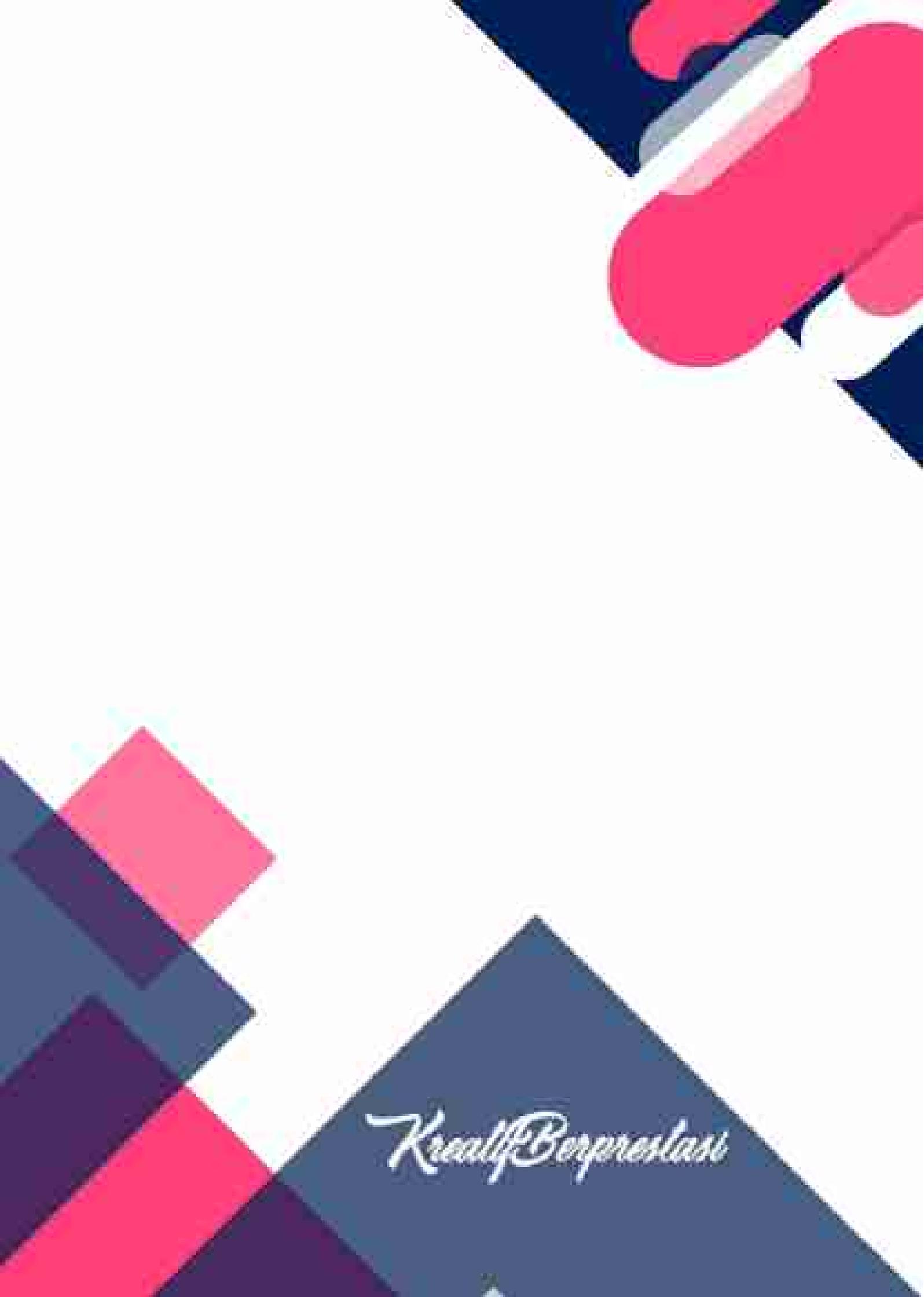


LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

TAHUN 2023

NOMOR : OT.04/LPP-33/PW22/6/2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024



Kreatif Berprestasi

KATA PENGANTAR



MUHAMMAD MASYKUR
KEPALA PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI



Kreatif Berprestasi

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan keuangan negara/daerah. Pertanggungjawaban kinerja ini menyajikan prioritas dan capaian-capaian kinerja kegiatan perwakilan sepanjang Tahun 2023. Segenap gagasan dan Upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan hasil akhir kinerja yang tertuang dalam laporan ini. Tahun 2023 merupakan periode keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2020 – 2024.

Sepanjang Tahun 2023, Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali berkontribusi positif bagi keuangan negara/daerah senilai Rp224.422.614.532,15 atau 190,09% dari target tahun 2023 sebesar Rp99.096.130.000,00. Perwakilan juga melaksanakan pengawasan terhadap Program Pembangunan prioritas nasional dan daerah pada tahun 2023 seperti pengawasan atas reformasi sistem Kesehatan, sarana dan prasarana Pendidikan; stunting; Proyek Strategis Nasional; P3DN; akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu dan pilkada; akuntabilitas keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa serta akuntabilitas keuangan BUMN dan BUMD. Disamping itu, perwakilan mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko, penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan SPI badan usaha, serta penguatan pengendalian risiko fraud pada Pemerintah Daerah/Badan Usaha.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan bagian dari kinerja BPKP sehingga diharapkan dengan tercapainya target-target kinerja akan mendukung tercapainya visi BPKP bagi Pemerintah yakni "Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

KATA PENGANTAR

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sehingga dapat menjalankan pengawasan dengan baik. Kami berharap laporan kinerja ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, maupun masyarakat pada umumnya.

Denpasar, 3 Januari 2024
Kepala Perwakilan,

Muhammad Masykur
NIP 19640227 198402 1 001



Ringkasan Eksekutif

Rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2023

175,71

SK I : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

190,09%

Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

TARGET
Jumlah
2.569
Realisasi
3.361

Capaian
100,00%

TARGET
Jumlah
54.171
Realisasi
150.446

Capaian
298,51%

TARGET
Jumlah
42.416
Realisasi
60.614

Capaian
142,90%

SK II : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

108,82%

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang dieliminasi

TARGET
85%

Realisasi
100%

Capaian
117,7%

Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawali

TARGET
2

Realisasi
2

Capaian
100%

SK III : Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP

Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti

TARGET
80

Realisasi
100

Capaian
125%

125,00%

SK IV : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Jumlah BUKB dengan terdapat pelanggaran

TARGET
1

Realisasi
2

Capaian
200%

Jumlah BUMD dengan masalah

TARGET
9

Realisasi
9

Capaian
100%

Jumlah BUMD dengan temuan pelanggaran

TARGET
1

Realisasi
2

Capaian
200%

Jumlah BUMD yang mampu membayar pajak

TARGET
59

Realisasi
87

Capaian
147,4%

Jumlah BUMD yang memberikan kontribusi pada perekonomian lokal

TARGET
20

Realisasi
77

Capaian
385%

206,49%



SK V : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

104,41%

Jumlah pengawasan preventif yang dilaksanakan



Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik



Jumlah pengawasan preventif dan reaktif yang dilaksanakan



Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik



SK VI : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

377,04%

Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3



Target Realisasi 100%

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3



Target Realisasi 100%

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPI >= Level 3



Target Realisasi 100%

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPI >= Level 3



Target Realisasi 100%

Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3



Target Realisasi 100%

Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3



Target Realisasi 125%

Jumlah Pemda yang swastabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah



Target Realisasi 30%

Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel



Target Realisasi 25,44%

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keef. desa secara memadai



Target Realisasi 70%

Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3



Target Realisasi 250%

Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3



Target Realisasi 120%

Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3



Target Realisasi 500%

Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3



Target Realisasi 100%

SK VII : Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan

SURAT PERINTIS

111%

Target 75 Realisasi 83

SARIP

101%

Target 93 Realisasi 93

UPE (Unit Kerja)

129%

Target 70 Realisasi 90,66

Keperawatan (K/PM)

100%

Target 100% Realisasi 100%

Kelembagaan (Kelemb)

120%

Target 75 Realisasi 90

TPPA

100%

Target 95 Realisasi 95

Pengawasan SAP

124%

Target 60 Realisasi 74

118,09%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	vii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Perencanaan Kinerja	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja	27
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	29
B. Capaian Kinerja Tahun 2023	29
1. Ringkasan Kinerja	29
2. Evaluasi Kinerja	34
Sasaran Kinerja 1	34
Sasaran Kinerja 2	41
Sasaran Kinerja 3	48
Sasaran Kinerja 4	50
Sasaran Kinerja 5	57
Sasaran Kinerja 6	67
Sasaran Kinerja 7	86
C. Analisis Efisiensi	95
D. Akuntabilitas Keuangan	97
E. Analisis Risiko	100
BAB IV Penutup	119
Kilas Balik	123
Lampiran	126



Kreatif Berprestasi

BARB I

PENDAHULUAN





CM
ENTERPRISE

CM

CM

Kreatif Berprestasi



A. TUGAS DAN FUNGSI



TUGAS BPKP

"Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional."

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pasal 2 dan 3 -

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;



FUNGSI BPKP

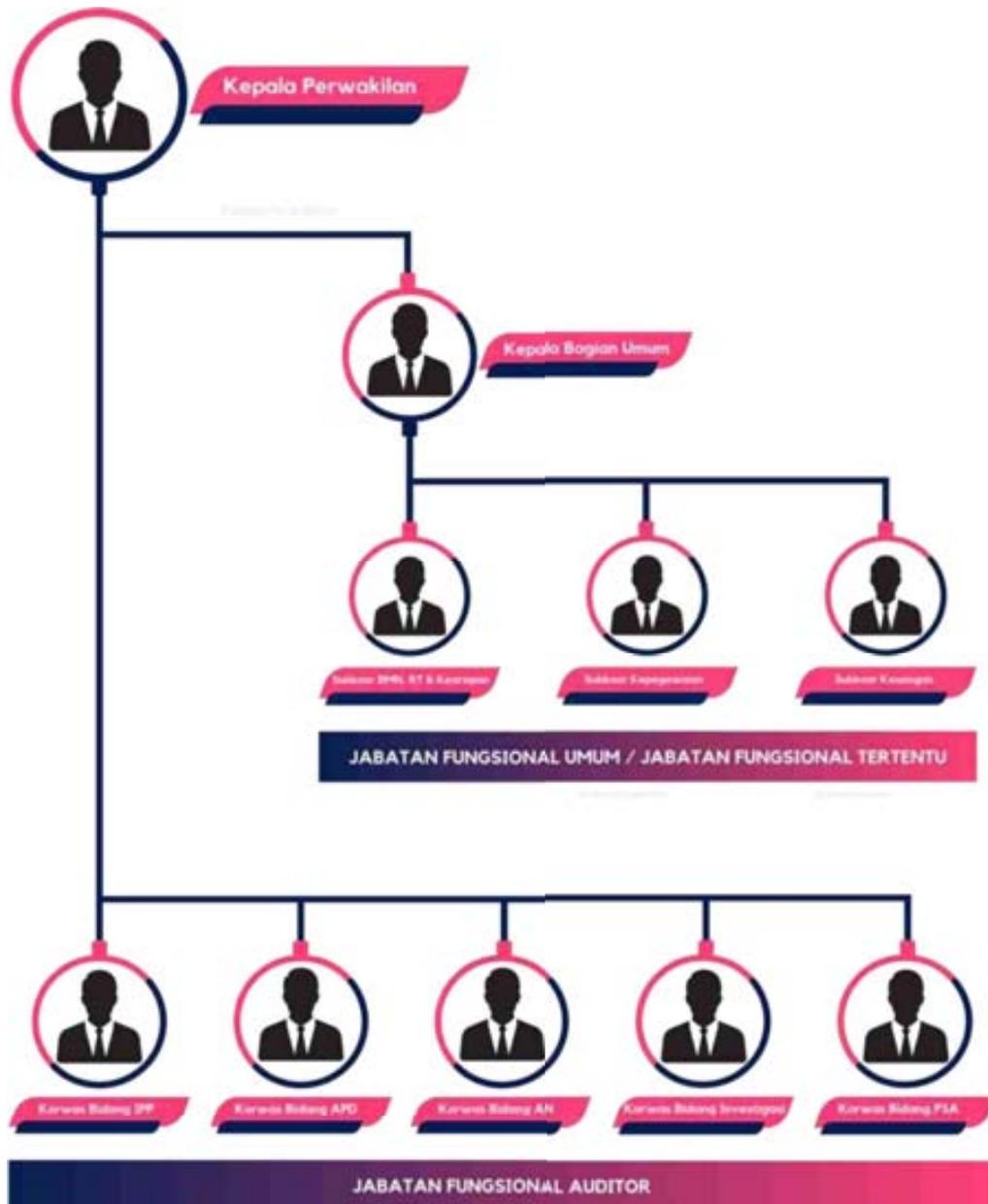


8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP;
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.





B. STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi perwakilan BPKP tipe B untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di wilayah Provinsi Bali dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.

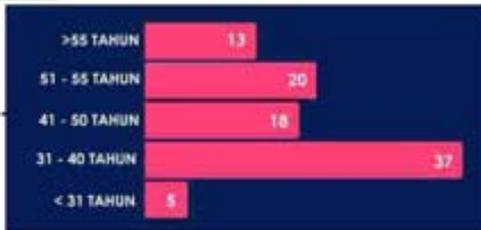


SDM PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

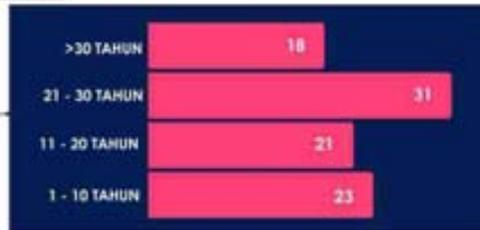


*per 31 Desember 2023

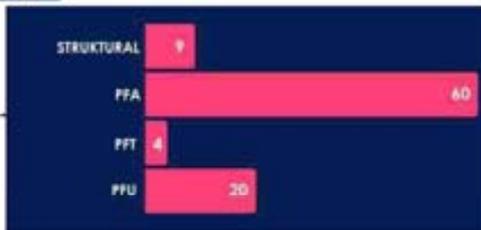
USIA



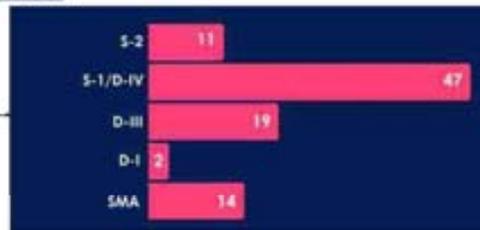
MASA KERJA



JABATAN



PENDIDIKAN





C. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI



ISU STRATEGIS PENGAWASAN BPKP



1. AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA DAN DAERAH

2. AKUNTABILITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL

3. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
BADAN USAHA

4. PEMBERANTASAN KORUPSI

5. PENGENDALIAN INTERN

6. TATA KELOLA PENGAWASAN
INTERN BPKP

Pada tahun 2020, Kepala BPKP telah menetapkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, dinyatakan bahwa BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden periode 2020-2024, melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan nasional.

Untuk menjalankan peran tersebut, dalam periode 2020-2024, BPKP melaksanakan pengawasan intern dan membangun tata kelola pengawasan intern dengan menitikberatkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah;
2. Pengawasan intern atas akuntabilitas pembangunan nasional;
3. Pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan badan usaha;
4. Pengawasan intern dalam rangka pemberantasan korupsi;
5. Pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian intern instansi pemerintah dan badan usaha; dan
6. Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan intern BPKP.

Isu-isu strategis tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah

Pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah dan tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) membutuhkan pendanaan yang sangat besar. BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan untuk meningkatkan ruang fiskal guna mendanai pembangunan nasional tersebut melalui pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan memastikan bahwa belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional telah efisien, serta mampu menyelamatkan keuangan negara dari segala kerugian akibat pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pengawasan intern atas akuntabilitas pembangunan nasional

Pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP harus terus dimonitor untuk memastikan agar kemajuannya sesuai dengan rencana dan pencapaiannya sesuai dengan target. BPKP mengemban amanat tersebut dan berperan dalam mengawal kemajuan pencapaian target, serta turut berperan menyampaikan saran strategis kepada Presiden dan penanggung jawab pembangunan nasional untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan nasional.



3. Pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan badan usaha

Badan usaha, yang terdiri dari badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum (BLU), dan badan usaha milik desa (BUMDes) berperan penting dalam menggerakkan perekonomian di tingkat nasional, daerah, dan desa. Di samping itu, badan usaha berkontribusi dalam mendanai pembangunan nasional, daerah, dan desa melalui pembagian keuntungan yang diperoleh kepada negara, daerah, dan desa. Untuk memastikan agar badan usaha dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, BPKP berperan dalam



membantu badan usaha untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitasnya, sehingga badan usaha dapat dikelola dengan akuntabel; mampu menggerakkan perekonomian nasional, daerah, dan desa sesuai dengan maksud pendiriannya; serta memberikan kontribusi dalam mendanai pembangunan nasional, daerah, dan desa.

4. Pengawasan intern dalam rangka pemberantasan korupsi

Korupsi masih menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2021, skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 38 (urutan 96 dari 180 negara) berdasarkan indikator nol (0 - sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Dalam periode 2020-2024, BPKP berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi, melalui upaya represif (penegakan hukum), preventif, dan edukatif. Upaya preventif dijalankan melalui sosialisasi dan evaluasi *fraud risk assessment (FRA)* dan *fraud control plan (FCP)*. Upaya edukasi anti korupsi dijalankan melalui sosialisasi program anti korupsi di lingkungan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat umum. Masyarakat umum menjadi sasaran sosialisasi program anti korupsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan deteksi dini korupsi.

5. Pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian intern instansi pemerintah dan badan usaha

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern. Penerapan sistem pengendalian intern dimaksudkan agar instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif, efisien dan ekonomis, dengan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjaga keamanan aset yang dimiliki. BPKP selaku pembina SPIP mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan penerapan SPIP yang memadai di lingkungan instansi pemerintah sesuai mandat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, BPKP perlu meningkatkan kapabilitas APIP instansi pemerintah sehingga dapat menjalankan perannya secara optimal untuk mewujudkan penerapan SPIP yang memadai di lingkungan instansi pemerintah masing-masing.



6. Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan intern BPKP

Untuk dapat menjalankan pengawasan secara profesional, kualitas tata kelola organisasi BPKP perlu terus menerus ditingkatkan. Pada periode 2020-2024, BPKP berkomitmen berperan aktif sebagai pemberi saran yang terpercaya bagi seluruh stakeholder BPKP (*Trusted Advisor*).





D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali terdiri atas empat bab:



Laporan Kinerja ini melaporkan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023, yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, dan berbagai kendala dalam pencapaian kinerja. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan dalam perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





Kreatif Berprestasi



A. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Dalam Renstra BPKP tahun 2020-2024, telah ditetapkan indikator-indikator dan target-target kinerja BPKP kurun waktu tahun 2020-2024 pada tingkat organisasi BPKP, tingkat unit kerja eselon I, dan tingkat unit kerja eselon II. Indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra tersebut, seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) pada tingkatannya masing-masing.

Program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, berupa program pengawasan pembangunan yang merupakan program untuk menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) dan program dukungan manajemen yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan.

Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan sasaran dan indikator kegiatan per tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1. – Indikator dan Target Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis (BPKP)	Sasaran Kegiatan (Eselon II)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
Program 06: Program Pengawasan Pembangunan									
SS1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	IKK1: Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Dalam juta)	136	407	610	813	1.016
			IKK2: Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Dalam juta)	271	678	1.016	1.355	1.694
			IKK3: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Dalam juta)	1.123	186.779	154.487	136.270	112.930
			IKK4: Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rupiah (Dalam juta)	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
			IKK5: Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Dalam juta)	-	118	120	122	125
			IKK6: Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Dalam juta)	-	59	60	61	62



No	Sasaran Strategis (BPKP)	Sasaran Kegiatan (Eselon II)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
Program 06: Program Pengawasan Pembangunan									
SS2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	IKK7: Jumlah Program Prioritas (PP) yang tercapai sesuai target	Jumlah PP	0	2	0	0	0
			IKK8: Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi	Jumlah KP	9	9	9	9	9
			IKK9: Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang tercapai sesuai target	Jumlah KP	9	9	9	9	9
			IKK10: Jumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target	Jumlah PSN	0	0	0	0	0
			IKK11: Jumlah Program Lintas Sektorial Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah Program Linsek	0	1	1	1	1
			IKK12: Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	%	0,00	25,00	37,50	50,00	62,50
			IKK13: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
SS3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	3. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	IKK14: Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0	0	0	0	0
			IKK15: Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	Jumlah BUMD	0	0	0	1	3
			IKK16: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	9	9	9
			IKK17: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	1	1	1	1	1



No	Sasaran Strategis (BPKP)	Sasaran Kegiatan (Eselon II)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
Program 06: Program Pengawasan Pembangunan									
			IKK18: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	18	23	27	34	38
SS4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	IKK19: Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			IKK20: Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
			IKK21: Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	0	0	2	3	4
			IKK22: Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	0	0	0	1	2
SS5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	5. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	IKK23: Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP	7	8	9	9	10
			IKK24: Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pemda	10	10	10	10	10
			IKK25: Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Pemda	0	0	1	1	1
			IKK26: Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemda	1	2	3	4	5



No	Sasaran Strategis (BPKP)	Sasaran Kegiatan (Eselon II)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
Program 06: Program Pengawasan Pembangunan									
			IKK27: Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	0,55	1,48	1,66	1,85	1,85
			IKK28: Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Rekomendasi	1	1	1	1	1
			IKK29: Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	44,97	50,00	55,03	60,06	64,94
			IKK30: Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	0	20	61	94	176
			IKK31: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	2	3	5	5
			IKK32: Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0	0	0	0	0
			IKK33: Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	0	0	1	2	4
			IKK34: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	0	1	3	4	5
			IKK35: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BUMD	0	0	0	1	3
			IKK36: Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BLUD	0	0	1	1	1
Program 01: Program Dukungan Manajemen Internal									
SS6	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	IKK 1: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	75	76	77	78	79
		Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Indeks Merit)	IKK 2: Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	100	100	100	100



No	Sasaran Strategis (BPKP)	Sasaran Kegiatan (Eselon II)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
Program 01: Program Dukungan Manajemen Internal									
			IKK 3: Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Unit Perwakilan	IKK 4: Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	100	100	100	100
			IKK 5: Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai (1-100)	86	87	88	89	90
			IKK 6: Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90	91	92	93	95
			IKK 7: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	%	100	100	100	100	100
			IKK 8: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			IKK 9: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai (1-100)	80	81	82	83	84
			IKK 10: Maturitas SPIP Unit Kerja	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		Meningkatnya Pengendalian Intern Unit Perwakilan	IKK 11: Indeks MR Unit Kerja	Level	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
			Meningkatnya Kepuasan Layanan Perwakilan	IKK 12: Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Nilai Indeks (skala 1-100)	70	76	80	81
		IKK 13: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)		Nilai Indeks (skala 1-100)	70	73	76	80	81



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka penguatan pencapaian sasaran strategis telah disusun perjanjian kinerja yang berisikan mandat dari Kepala BPKP kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2023 telah menetapkan sasaran kinerja dengan indikator kinerja kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2. – Perjanjian Kinerja 2023 (Revisi)

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Dalam juta)	2.569
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Dalam juta)	54.111
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Dalam juta)	42.416
2.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan	%	85
		2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2
3.	Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggungjawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	%	80
4.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik	BUMD	1
		4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	59
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	20
5.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100



No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	85
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	2
6.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab./Kota	8
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab./Kota	9
		6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	1
		6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab./Kota	4
		6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	10
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25
		6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25
		6.10	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	2
		6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	10
		6.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1
		6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	3
7.	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
		7.3	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	%	70
		7.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	%	100
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80

Perwujudan janji kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 tersebut di atas didukung oleh dana DIPA BPKP sebesar Rp25.868.406.000,00.

Sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, rencana kinerja BPKP tahun 2023 diarahkan pada pengawasan atas pencapaian target RKP tahun 2023, yaitu fokus mengawal transformasi ekonomi dan produktivitas.

BPKP melakukan pengawasan terhadap rencana kerja pemerintah tersebut dan menuangkan dalam Kebijakan Pengawasan berupa Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) BPKP Tahun 2023.

APP dan APPD BPKP Tahun 2023 merupakan terobosan baru BPKP agar pengawasan terkoordinasi dan terarah dalam rangka mengawal percepatan pemulihan ekonomi nasional. APP tersebut terbagi dalam 7 sektor, 26 tema dan 105 topik pengawasan. Rincian APP BPKP Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Sektor/Tema	Topik
A. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan b. Bantuan Operasional Sekolah c. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi d. Kinerja Pendidikan Tinggi e. Pemajuan Kebudayaan f. Resiliensi Pendidikan Nasional
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Kesehatan Nasional b. Reformasi Sistem Kesehatan – Layanan Primer c. Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Rujukan d. Reformasi Sistem Kesehatan – Kualitas dan Redistribusi Nakes e. Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit f. Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan) g. Akuntabilitas Penanganan Covid-19 h. Percepatan Penurunan Stunting i. Skema Kesehatan Adaptif



No.	Sektor/Tema	Topik
	3. Kesejahteraan Sosial	a. Transformasi Data Menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) b. Bauran Program Kesejahteraan Sosial c. Penguatan Platform Penyaluran s.d Pemanfaatan Bantuan Sosial d. Implementasi Bansos APBD e. Implementasi Bansos APBDes f. Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem g. Pengembangan Perlindungan Sosial Adaptif
B. Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		
	1. Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar (PSN & Non PSN)	a. Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat) b. Infrastruktur SPAM c. Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi
	2. Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Mobilitas (PSN & Non PSN)	a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Infrastruktur SPAM b. Infrastruktur Jalan Tol c. Pembangunan Infrastruktur Kereta d. Pembangunan Bandara e. Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan
	3. Penguatan Infrastruktur Informasi dan Komunikasi (PSN & Non PSN)	a. Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi b. Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) c. Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)
	4. Pembangunan dan Tata Kelola IKN	-
C. Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa		
	1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat	a. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L b. Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat c. Optimalisasi Pendapatan Negara (Perpajakan, Kepabeaan dan Cukai, serta PNBP) d. Optimalisasi Pembiayaan Inovatif (Pinjaman Luar Negeri, KPBU, SWF, SBN dan SBSN) e. Akuntabilitas Dana Siap Pakai (DSP) Dalam Rangka Penanggulangan Bencana
	2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	a. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah b. Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah c. Optimalisasi PAD



No.	Sektor/Tema	Topik
		d. Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah e. Efektifitas Dana Transfer Umum f. Efektifitas Dana Otonom Khusus g. Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	a. Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa b. Akuntabilitas Keuangan Desa c. Akuntabilitas Aset Desa
4.	Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan	a. BUMN b. BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BUMD Aneka Usaha) c. BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah) d. BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan – Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)
D. Pembangunan Ekonomi		
1.	Neraca Perdagangan	a. Peningkatan Ekspor b. Pengendalian Impor c. Kerjasama Ekonomi/Perdagangan Internasional (Bilateral dan Multilateral)
2.	Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM	a. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM b. Akses Permodalan UMKM c. Insentif Pajak UMKM
3.	Peningkatan Arus Masuk Investasi dan Penguatan Industri Dalam Negeri	a. P3DN b. Kemudahan Perizinan Berusaha c. Hilirisasi Industri d. Tata Kelola Industri Tambang, meliputi : Batubara, Timah, Bauksit dan Nikel e. Insentif Pajak dan Kepabeanaan Korporasi f. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri
4.	Pariwisata	a. Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata b. Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN) c. Dukungan Pengembangan Pariwisata
E. Ketahanan Pangan		
1.	Peningkatan Produksi Pangan (On Farm)	a. Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional b. Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul c. Tata Kelola Pupuk Nasional d. Peningkatan Produksi Pakan Ternak e. Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional f. Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan



No.	Sektor/Tema		Topik
			g. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan h. Penanggulangan Hama dan Penyakit
	2.	Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan (<i>Off Farm</i>)	a. Penanganan Pasca Panen b. <i>Supply Chain</i> Komoditas Pangan c. Kebijakan Stabilitas Harga d. Kebijakan Ekspor/Impor Pangan
	3.	Resiliensi Cadangan Pangan Nasional	a. Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat b. Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah c. Peningkatan Kualitas, Keamanan, dan Diversifikasi Pangan d. Efisiensi Industri Pupuk Nasional e. <i>Food Estate</i> f. Lumbung Ikan Nasional
F.	Ketahanan Energi		
	1.	Tata Kelola Kelembagaan dan Pendanaan	a. Tata Kelola Kelembagaan b. Tata Kelola Pendanaan
	2.	Ketersediaan Energi	a. Penyediaan Energi b. Pengendalian Ketergantungan Impor Energi c. Tata Kelola Cadangan Energi
	3.	Akses Terhadap Energi	a. Infrastruktur Energi (Produksi dan Distribusi) b. Distribusi dan Pemerataan Energi
	4.	Keterjangkauan Energi	a. Tata Kelola Investasi Sektor Energi b. Akuntabilitas Pembentukan Harga Energi c. Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi
	5.	Transformasi Energi Hijau	a. Transisi Menuju Energi Baru Terbarukan b. Konservasi Energi dan Sumber Daya Energi c. Investasi dan Riset Bidang Energi Terbarukan
G.	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih		
	1.	Penguatan Tata Kelola	a. Maturitas SPIP/MRI b. Pengelolaan Risiko Sektor Strategis Nasional c. Kapabilitas APIP d. Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan
	2.	Reforma Agraria	-
	3.	Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	a. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu b. Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ¹ c. Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan



Sedangkan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) di Provinsi Bali antara lain:

1. Program Transformasi Ekonomi Bali Melalui Pengembangan Kawasan Wisata Ulanan
2. Program Pengelolaan Sampah Provinsi Bali



BAAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





Berprestasi



A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2023. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi realisasi kinerja dari pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam tahun 2023, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan realisasi tersebut dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah rumus *maximize*, sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 merupakan akuntabilitas kinerja tahun keempat dari Renstra BPKP tahun 2020-2024 yang terdiri dari tujuh sasaran kegiatan atas dua program. Pada tahun 2023, sebanyak tujuh Sasaran Kegiatan telah ditetapkan, yang keberhasilannya dinilai dengan 35 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

1. Ringkasan Kinerja

Secara umum, rerata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 adalah 175,71%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas tujuh Sasaran Kegiatan dengan 35 IKK yang ditargetkan pada tahun 2023, sebanyak 34 IKK telah mencapai/melampaui target, dan sebanyak 1 IKK belum mencapai target. Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp25.801.306.593,00 atau 99,74% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp25.868.406.000,00. Uraian rerata capaian kinerja masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:



- 1) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah sebesar 190,09%. Keberhasilan pencapaian didukung dengan komitmen pemda untuk menindaklanjuti hasil evaluasi OPAD dan pemantauan *monitoring* tindak lanjut OPAD yang dilakukan secara berkala oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
- 2) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional sebesar 108,82%. Keberhasilan pencapaian didukung dengan komitmen mitra kerja dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi.
- 3) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP sebesar 125,00%. Keberhasilan pencapaian didukung dengan komitmen mitra kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan.
- 4) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha sebesar 206,49%. Keberhasilan pencapaian didukung komitmen badan usaha dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, serta kerja sama yang baik dengan badan usaha yang dibina.
- 5) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi sebesar 104,41%. Keberhasilan pencapaian didukung dengan melakukan penugasan pengawasan bersifat edukasi dan pencegahan korupsi, dan penugasan pengawasan respons atas kecurangan/korupsi. Semua hasil pengawasan telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh *stakeholders*.
- 6) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU sebesar 377,04%. Keberhasilan pencapaian didukung Perwakilan BPKP yang proaktif dalam mendorong pemda/badan usaha untuk menerapkan SPIP/MR/Kapabilitas APIP/akuntabilitas keuangan melalui pendampingan dan Komitmen dari Pemda/badan usaha untuk menerapkan SPIP/MR/Kapabilitas APIP.



7) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan sebesar 118,09%. Keberhasilan pencapaian didukung dengan sinergi dan koordinasi yang baik antar bidang.

Ketujuh sasaran kegiatan di atas diukur dengan 35 IKK. Berdasarkan hasil pengukuran 35 IKK, 34 IKK telah mencapai kinerja di atas 100% sedangkan satu IKK yang lain masih berada di bawah 100%. Satu IKK yang belum mencapai target disebabkan keselarasan perencanaan serta pemenuhan kriteria SMART pada indikator dan target kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah perlu ditingkatkan. Rincian capaian masing-masing sasaran strategis dan IKK disajikan dalam Table 3.1.

Tabel 3.1. – Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2023 (Revisi)

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
I Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	2.569	3.361,42	130,85	■
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (juta)	54.111	160.446,59	296,51	■
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (juta)	42.416	60.614,60	142,90	■
II Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
2.1	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan	%	85	100,00	117,65	■
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2	2	100	■
III Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP						
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	%	80	100,00	125,00	■



No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IV Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	2	200,00	■
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	100,00	■
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	2	200,00	■
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	59	87	147,46	■
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	20	77	385,00	■
V Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100	100	100,0	■
5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	85	100	117,65	■
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	3	100,00	■
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	2	2	100,00	■
VI Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	■
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/ Kota	8	9	112,50	■



No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	■
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	9	9	100,00	■
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	■
6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	4	5	125,00	■
6.7	Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	10	3	30,00	■
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	636	2.544,00	■
6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	180	720,00	■
6.10	Jumlah BUMD dengan MRI $>$ Level 3	BUMD	2	5	250,00	■
6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLUD	10	12	120,00	■
6.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1	5	500,00	■
6.13	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	3	3	100,00	■
VII Meningkatkan Tata Kelola Unit Perwakilan						
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	83,51	111,35	■
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	83,10	101,34	■
7.3	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	%	70	90,66	129,51	■
7.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	%	100	100	100,00	■

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	90,12	120,16	■
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	95,84	100,88	■
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	80	99,86	124,83	■

Keterangan:

- Tercapai/melampaui target
- Belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
- Belum mencapai target

2. Evaluasi Kinerja

1 SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” diindikasikan dalam capaian tiga IKK, yaitu:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
2. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
3. Nilai penyelamatan keuangan Negara

Tabel 3.2. – Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah					
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	2.569	3.361,42	130,85	■
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (juta)	54.111	160.446,59	296,51	■



No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (juta)	42.416	60.614,60	142,90	■
Total/Rerata Capaian			99.096	224.422,61	190,09	

Tabel 3.2. di atas menunjukkan bahwa hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 telah berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal sebesar Rp224.422.614.532,15. Dengan demikian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” memiliki capaian kinerja yaitu sebesar 190,09% dari target tahun 2023 sebesar Rp99.096.000.000,00. Tingginya capaian kinerja karena adanya efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah dan komitmen *auditee* dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP. Uraian selengkapnya atas kinerja empat IKK sasaran kegiatan 1 sebagai berikut:

2.1.1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi” menggambarkan nilai realisasi penerimaan negara/daerah yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP.

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi diukur dari jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk PNBPD berdasarkan bukti setor
- Untuk Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan
- Untuk PAD berdasarkan Surat Ketetapan

Pada tahun 2023, nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi sebesar Rp3.361.421.704,81 atau tercapai 130,85% dari target sebesar Rp2.568.860.000,00. Nilai tersebut merupakan hasil optimalisasi pengawasan OPAD pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar dengan rincian sebagai berikut:

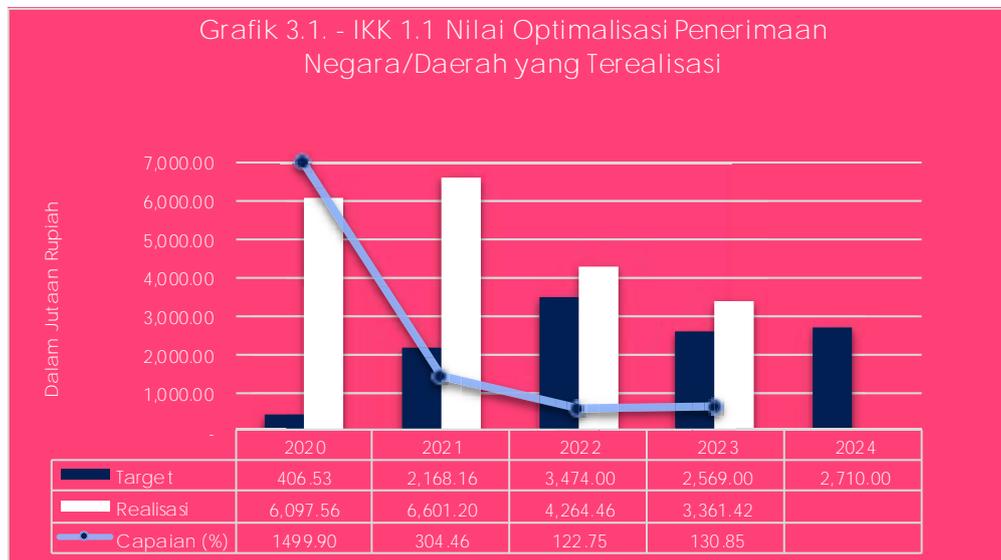
Tabel 3.3. – Ringkasan Nilai Potensi Penerimaan Daerah yang Terealisasi Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Potensi OPAD (Rp)
1	Pajak Hotel	540.895.033,00
2	Pajak Restoran	2.050.125.829,00

No	Jenis Penerimaan	Potensi OPAD (Rp)
3	Pajak Air Tanah	714.413.074,00
4	Pajak Hiburan	7.236.574,00
5	Pajak Penerangan Jalan	61.097,81
Total		3.361.421.704,81

Realisasi "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" mengalami penurunan sebesar Rp903.037.903,19 atau 21,18% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.264.459.608,00. Realisasi tahun 2023 telah melampaui target akhir Renstra sebesar Rp2.710.000.000,00.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.1.



Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- a. Melakukan asistensi teknik pemeriksaan pajak kepada tim pajak pemerintah kabupaten;
- b. Melakukan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.



2.1.2. Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah" menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Menilai efisiensi dan kesesuaian belanja dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku yakni:

- a. Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
 1. dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat
 2. rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat
 3. ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil
- b. Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi cost-recovery, audit penyesuaian harga, audit cost-saving, dan sebagainya.

Realisasi IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah" tahun 2023 sebesar Rp160.446.592.075,61 atau tercapai 296,51% dari target Rp54.111.270.000,00. Realisasi tersebut merupakan hasil pengawasan dengan rincian sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4. – Ringkasan Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah Tahun 2023

No	Nama Topik	Nilai (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	111.640.288.210,00
2	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	1.105.122.092,67
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	187.069.469,00
4	Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	47.514.112.303,94
Total		160.446.592.075,61

Jenis pengawasan yang berkontribusi tinggi dalam mendukung pencapaian kinerja ini adalah penghematan keuangan negara/daerah lainnya, yang ditunjukkan melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut:

- a. Evaluasi perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada se-Pemerintah Provinsi Bali;
- b. Evaluasi atas Pembiayaan Daerah Tahun 2023 pada Kabupaten Gianyar;
- c. Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Daerah Tahun 2023 pada Provinsi Bali;
- d. Audit Penyesuaian Harga atas Paket Penggantian Jembatan Ruas SP. Cokroaminoto - SP. Tohpati (Jalan Gatot Subroto Timur);
- e. Audit Penyesuaian Harga atas Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan Tamblang pada SNVT Pembangunan BWS Bali – Penida;
- f. Audit Penyesuaian Harga atas Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Bangli dan Gianyar pada SNVT Pembangunan BWS Bali – Penida.

Realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp278.236.856.599,97 atau 63,43% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp438.685.448.675,58. Realisasi tahun 2023 telah melampaui target akhir Renstra sebesar Rp112.930.000.000,00.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.2.



Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- a. Melakukan revisi anggaran dan penyesuaian Rancangan Biaya Anggaran (RBA) pemilihan;



- b. Melakukan revisi anggaran untuk pembayaran tunggakan atas pekerjaan Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai yang telah terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022;
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan mitra kerja;
- d. Meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan keselarasan perencanaan pada pemerintah daerah;
- e. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait pengawasan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa.

2.1.3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

IKK "Nilai penyelamatan keuangan Negara" menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara.

IKK ini diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan, misalnya melalui kegiatan audit investigatif, audit PKKN, dan audit lainnya.

Realisasi IKK "Nilai penyelamatan keuangan Negara" tahun 2023 sebesar Rp60.614.600.751,73 atau tercapai 142,90% dari target Rp42.416.000.000. Ringkasan nilai penyelamatan keuangan negara tahun 2023 sebesar Rp60.614.600.751,73 disajikan sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5. – Ringkasan Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Tahun 2023

No	Nama Topik	Nilai (Rp)
1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	15.445.828.368,19
2	Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	2.329.043.970,50
3	Efektivitas Transfer ke Daerah	738.000,00
4	Penugasan Pengawasan atas Permintaan K/L dan/atau Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan	1.818.393.597,46
5	BUMN	24.568.254.275,58
6	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu	16.452.342.540,00
Total		60.614.600.751,73

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) secara intensif agar kasus yang sedang ditangani dapat dikonsultasikan terlebih dahulu, guna meyakinkan layak/tidaknya kasus tersebut ditindaklanjuti dengan audit PKN atau audit investigasi;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar pemenuhan data dukung dapat dilaksanakan secara optimal mendukung penugasan;
- Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan BPKP terkait dengan adanya koreksi/penyelamatan keuangan negara;
- Menguatkan peran Inspektorat daerah untuk melakukan kegiatan investigasi;
- Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan APH dan Inspektorat daerah.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai penyelamatan keuangan Negara" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.3.





2

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” diindikasikan dalam capaian dua IKK, yaitu:

1. Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

Tabel 3.6. – Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional					
2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	85	100	117,65	■
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100,00	■
Rerata Capaian					108,82	

Tabel 3.6. di atas menunjukkan bahwa sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” memiliki capaian kinerja rata-rata yaitu sebesar 108,82% dari target tahun 2023. Uraian atas kinerja kedua IKK sasaran kegiatan sebagai berikut:

2.2.1. Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

IKK “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” menunjukkan sejauh mana *stakeholder* yaitu pemerintah daerah terkait dengan perbaikan kelancaran pembangunan telah diselesaikan. IKK ini diukur dari pembagian jumlah laporan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang kesepakatannya terlaksana dibandingkan dengan jumlah penugasan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Realisasi IKK “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” tahun 2023 adalah 100% atau tercapai 117,65% dari target sebesar 85%. Realisasi tersebut terdiri dari enam penugasan evaluasi hambatan pelaksanaan pembangunan program ketahanan pangan yang kesepakatannya telah dilaksanakan oleh *stakeholder*, antara lain evaluasi hambatan kelancaran pembangunan atas peningkatan infrastruktur pangan nasional, peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani dan nelayan, penanggulangan hama dan penyakit, peningkatan produksi pakan ternak, tata kelola lahan pertanian dan tata kelola pupuk nasional di Provinsi Bali.

Realisasi IKK tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% dan telah melampaui target akhir renstra tahun 2024 sebesar 85%.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan” tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.5.



Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain menginventarisir kegiatan hambatan kelancaran pembangunan di Provinsi Bali dan berkoordinasi dengan *stakeholder* agar dapat membantu memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh para pihak terkait dengan memberikan usulan alternatif penyelesaian sehingga pembangunan dapat berjalan kembali sesuai dengan tujuan.



2.2.2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” menunjukkan jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) tahun tertentu yang diawasi dengan kegiatan pengawasan BPKP. Pengawasan dimaksudkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan prioritas daerah mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan Kegiatan Prioritas Daerah yang diawasi dengan kegiatan pengawasan perwakilan pada tahun berjalan.

Realisasi IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” tahun 2023 adalah sebanyak dua kegiatan atau tercapai 100% dari target sebanyak dua program. Dua kegiatan/program daerah yang diawasi sebagai berikut:

1. Program Transformasi Ekonomi Bali Melalui Pengembangan Kawasan Wisata Ulapan Pada Kabupaten Gianyar

Rencana pengembangan Kawasan Wisata Ulapan sebagaimana tertuang dalam *White Paper* Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata Ulapan dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai dengan 2026 bersumber dari APBD, APBN atau KPBU dengan total perkiraan pendanaan sebesar Rp34Triliyun. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar menyusun rencana aksi dari *White Paper* Kawasan Terpadu Ulapan sebesar ±Rp34triliyun.

Kebijakan yang terbangun belum cukup memadai dalam pengembangan kawasan wisata. Dalam hal ini belum disusun rancangan kebijakan tentang Zonasi Pengembangan Ulapan yang memfokuskan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi di Kawasan Ulapan, sebagai acuan yang komprehensif mengenai pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, sehingga terwujud pengelolaan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dengan berpedoman pada kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.



Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program yaitu terdapat 6 rencana kegiatan berupa usulan pembangunan *Light Rail Transit (LRT)* serta fasilitas pendukungnya yang *depending* untuk dikaji lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat.

Tahun 2023 belum terdapat anggaran bersumber dana APBD untuk kegiatan pengembangan Kawasan Wisata Ulan.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dilakukan terhadap dua kegiatan bersumber dana APBD yang telah selesai dilakukan yaitu Pembangunan Pasar Tematik Ubud dan Penataan Jalan Catus Patha Ubud. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian *output* dan *outcome* dua pekerjaan tersebut telah mencapai target.

Keberlanjutan Pelaksanaan Program

1. Sampai dengan Bulan Desember 2023 realisasi kegiatan pengembangan Kawasan Ulan sebesar 16,07%, terdiri atas realisasi sumber dana APBD sebesar 10,75%, APBN melalui *ISWMP (Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities Program)* sebesar 5,36%. Belum ada kejelasan sumber pembiayaan dan kejelasan pelaksanaan atas sisa kegiatan yang belum dilaksanakan
2. Tujuh belas dokumen perencanaan berupa *Detail Engineering Design (DED)* berpotensi tidak efektif.

Kendala utama untuk pelaksanaan kegiatan adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Gianyar telah menyusun Laporan Akhir Studi Kelayakan (FS) Penataan *Pedestrian Way* Kawasan Perkotaan Ubud (Jl. Pengosekan, Jl. *Monkey Forest*, Jl. Hanoman, Jl. Raya Ubud), guna memberikan analisis kelayakan teknis, analisis aspek lingkungan, aspek social dan ekonomi serta dapat memberikan rekomendasi dalam kelayakan Penataan *Pedestrian Way* Kawasan Perkotaan Ubud.

2. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Tahun 2023

Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.590,15 km² atau 0,30% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam



delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar.

Di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 825,1 ribu jiwa atau 18,69% dari seluruh penduduk Provinsi Bali. Dengan luas wilayah yang mencapai 1.322,68 km², dan kepadatan penduduknya sebesar 624 jiwa/km² atau masih di bawah rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Bali secara umum. Sebaliknya, Kota Denpasar memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi di Provinsi Bali sebesar 5.774 jiwa/km dengan luas wilayah hanya 125,87 km².

Kota Denpasar yang merupakan pusat kegiatan nasional menjadikan perekonomian Kota Denpasar mengalami perkembangan. Pesatnya perkembangan perekonomian Kota Denpasar, menjadi daya tarik tersendiri, yang menyebabkan tingginya arus migrasi ke Kota Denpasar. Hal ini juga yang menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah penduduk Kota Denpasar, yang berdampak juga semakin tingginya volume sampah yang dihasilkan tiap harinya. Arus migrasi tersebut dapat memberikan beberapa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi tetapi juga memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah terjadinya pencemaran lingkungan, air tanah, potensi terjadinya kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), banjir akibat sampah yang pada akhirnya menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat di kawasan yang terdampak.

Kebijakan pengelolaan sampah pada kabupaten/kota Sarbagita telah selaras dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dengan menerbitkan peraturan Pengelolaan Sampah pemerintah kabupaten/kota di Bali dilakukan pada 258 Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R), 7 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPA.

Sampai dengan Oktober 2023, tumpukan sampah di TPA Regional Sarbagita telah mencapai ketinggian 45 meter. Tingginya tumpukan sampah menimbulkan gas metan yang mudah



mengeluarkan api yang diduga sebagai pemicu kebakaran TPA Regional Sarbagita tanggal 12 Oktober 2023 - 8 November 2023, ditambah musim panas yang melanda di wilayah Bali. Kebakaran TPA Regional Sarbagita ditetapkan sebagai status tanggap darurat bencana kebakaran oleh Walikota Denpasar. Di sisi lain dengan terbakarnya TPA Regional Sarbagita terdapat pengurangan sampah hampir 35% dari total keseluruhan sampah yang ada di lokasi pembuangan dan diperkirakan dapat menampung kurang lebih 4 bulan.

Sejalan dengan program pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah, masing-masing pemerintah kabupaten/kota telah memiliki program yang sama dan dituangkan dalam RPJMD kabupaten/kota dan terdapat keterbatasan anggaran pengelolaan sampah.

Pelaksanaan program pengelolaan sampah sampai dengan bulan Juni 2023 belum optimal, sehingga mengakibatkan target capaian kinerja non keuangan juga tidak tercapai.

Permasalahan sampah sampai dengan triwulan IV tahun 2023 masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam mengatasi masalah sampah, antara lain dengan menerbitkan kebijakan pengelolaan sampah, menyiapkan infrastruktur pengolahan sampah, pemberdayaan masyarakat desa, melibatkan pihak ke-3 serta lembaga pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah membangun TPS3R dengan konsep "pengelolaan sampah dari sumbernya", membangun TPST, dan mengajak masyarakat memilah dan mengolah sampah secara mandiri, mendidik siswa di sekolah dengan budaya hidup bersih, dengan harapan masyarakat mendapatkan manfaat dari sampah yang dikelola. Pemerintah daerah membangun desa-desa percontohan (desa yang mengelola sampah mandiri) dengan harapan masyarakat desa lainnya bisa meniru, namun belum menunjukkan penambahan jumlah desa yang signifikan yang mampu mengolah sampah secara mandiri.

Berdasarkan atas hasil evaluasi program peningkatan pengelolaan sampah di Provinsi Bali diperoleh kesimpulan sebagai berikut:



- a. Penilaian aspek kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Bali telah memadai, seluruh pemda telah mengimplementasikan Undang-Undang RI No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- b. Penilaian aspek tata kelola pengelolaan sampah di Provinsi Bali **belum memadai**. Dengan berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota Sarbagita belum mampu mengatasi permasalahan sampah secara signifikan. Kegiatan yang dilakukan hanya mampu untuk mengurangi sampah atau hanya memperlambat bom waktu meledaknya masalah sampah. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota Sarbagita;
- c. Penilaian aspek perencanaan dan penganggaran program pengelolaan sampah di Provinsi Bali **belum memadai**. Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota menuangkan program pengelolaan sampah pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan didukung dengan anggaran yang terbatas.;
- d. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar per 30 Juni 2023, capaian realisasi anggaran sebesar Rp150.905.900.431,00 atau 32,32% dari total anggaran program pengelolaan sampah sebesar Rp466.930.966.167,00.
- e. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek kebijakan, perencanaan, penganggaran serta capaiannya, program peningkatan pengelolaan sampah Sarbagita dapat dilanjutkan dengan memperhatikan saran/rekomendasi yang muncul atas area-area yang masih memerlukan perbaikan sebagai hasil dari monitoring dan evaluasi atas program tersebut.
- f. Penilaian aspek dampak/kebermanfaatan program pengelolaan sampah di Provinsi Bali **belum memadai** dimana sampai dengan Triwulan IV 2023, sampah masih menjadi

permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diatasi sehingga belum memberikan dampak positif.

Realisasi maupun capaian IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun akhir Renstra, karena tidak terdapat target IKK tersebut pada tahun 2021 dan tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.5.



3 SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” diindikasikan dalam capaian satu IKK, yaitu:

2.3.1. Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” menunjukkan sejauh mana Perwakilan dapat menghasilkan Rekomendasi Strategis disampaikan kepada para *stakeholder* yaitu pemerintah daerah terkait dengan perbaikan akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintahan. IKK ini diukur dari pembagian



jumlah rekomendasi strategis yang telah ditindaklanjuti oleh *stakeholders* dengan jumlah rekomendasi strategis yang disampaikan atas hasil pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Realisasi IKK "Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti" tahun 2023 adalah 100,00% atau tercapai 117,65% dari target sebesar 80%. Dari 19 rekomendasi yang disampaikan sebanyak 19 rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Realisasi IKK "Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti" meningkat 18,75% dibandingkan dengan tahun 2022, namun tidak dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra, karena tidak terdapat target IKK tersebut pada tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.6.



Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga secara berkala;
2. Meningkatkan koordinasi dengan APIP Pemerintah Daerah untuk turut serta mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

4

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” diindikasikan dalam capaian lima IKK, yaitu:

1. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik;
2. Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat;
3. Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat;
4. Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan; dan
5. Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi Pada Perekonomian Desa.

Tabel 3.7. – Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha					
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	2	200,00	■
4.2	Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	9	9	100,00	■
4.3	Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	1	2	200,00	■
4.4	Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan	BUMDes	59	87	147,46	■
4.5	Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa	BUMDes	20	77	385,00	■
Rerata Capaian					206,49	

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mendorong meningkatnya pengawasan pembangunan atas Badan Usaha. Dengan demikian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” telah melampaui target dengan capaian sebesar 206,49% dari target kinerja tahun 2023. Uraian masing-masing IKK sasaran kegiatan ini sebagai berikut:



2.4.1. Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

IKK "Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik" menunjukkan jumlah BUMD yang memperoleh predikat penerapan GCG Baik. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendukung IKK ini antara lain melakukan *assessment/diagnostic assessment* GCG dan mendorong BUMD untuk menindaklanjuti rekomendasi AOI yang diberikan BPKP.

Realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik" tahun 2023 sebanyak 2 BUMD atau 200,00% dari target 1 BUMD. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil *mapping* GCG oleh BPKP Pusat dan *diagnostic assessment* perwakilan. BUMD yang telah memiliki pengelolaan korporasi baik dari hasil pengawasan yang dilakukan adalah Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar dan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.

Realisasi IKK tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena tidak terdapat target IKK ini pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2023 mencapai 66,67% dari target 3 BUMD. Dengan demikian capaian kinerja ini perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan *asesment* GCG pada BUMD.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.7.



2.4.2. Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

IKK "Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat" menunjukkan jumlah BUMD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun asesor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori "Sehat". Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendukung IKK ini antara lain melakukan audit/evaluasi kinerja pada BUMD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOI yang diberikan. IKK ini diukur dengan jumlah BUMD dengan kinerja minimal "Sehat" pada tahun berjalan.

Realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat" tahun 2023 sebanyak 9 BUMD atau 100,00% dari target 9 BUMD. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian kinerja Tahun Buku 2022 atas 13 BUMD di wilayah Provinsi Bali dengan 9 BUMD memperoleh predikat "Sehat" atau nilai kriteria tingkat kesehatan di atas 2,9, dengan rincian sebagai berikut:

No	BUMD	Kinerja Tahun 2023	
		Nilai	Predikat
A	Nilai Kinerja Sehat		
1	Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung	3,52	Sehat
2	Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli	3,02	Sehat
3	Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng	3,79	Sehat
4	Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar	3,70	Sehat
5	Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana	3,10	Sehat
6	Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem	3,12	Sehat
7	Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung	2,89	Sehat
8	Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan	3,66	Sehat
9	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	4,12	Sehat
B	Nilai Kinerja Kurang Sehat		
1	Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung	51,30	Kurang Sehat



No	BUMD	Kinerja Tahun 2023	
		Nilai	Predikat
2	Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	56,50	Kurang Sehat
3	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	60,20	Kurang Sehat
4	Perumda Pasar Argha Nayattoma Kabupaten Buleleng	51,30	Kurang Sehat

Realisasi IKK tahun 2023 sebanyak 9 BUMD dengan kinerja sehat, sama dengan realisasi kinerja tahun 2022, dan telah mencapai target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 9 BUMD. Dengan demikian capaian kinerja ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait kinerja BUMD.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.8.



2.4.3. Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" menunjukkan banyaknya BLUD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai

kategori "Sehat". Kegiatan pengawasan untuk mendukung IKK ini yakni melakukan audit kinerja pada BLUD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOI yang diberikan. IKK ini diukur dengan jumlah BLUD dengan kinerja minimal "Sehat" pada tahun berjalan.

Realisasi IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" pada tahun 2023 sebanyak dua BLU/D dengan kinerja sehat atau 200% dari target satu BLUD. Realisasi tersebut merupakan hasil atas evaluasi kinerja tahun anggaran 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Kota Denpasar dan Universitas Pendidikan Ganesha dengan kinerja baik/sehat.

Realisasi IKK tahun 2023 sebanyak dua BLU/D dengan kinerja sehat sama dengan realisasi tahun 2022. Realisasi tahun 2023 telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar satu BLU/D. Dengan demikian capaian kinerja ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait kinerja BLUD.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.9.



2.4.4. Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun

IKK "Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan" menunjukkan BUMDes yang dapat menyusun laporan keuangan setelah adanya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dari BPKP.



Kegiatan untuk mendukung IKK ini antara lain kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada BUMDes dan memantau perkembangan BUMDes dalam usahanya menyusun laporan keuangan.

Realisasi IKK pada tahun 2023 sebanyak 87 BUMDes telah mampu menyusun laporan keuangan, atau 147,46% dari target sebanyak 59 BUMDes. Sebaran 87 BUMDes tersebut sebagai berikut: Realisasi IKK pada tahun 2023 sebanyak 87 BUMDes telah mampu menyusun laporan keuangan, atau 147,46% dari target sebanyak 59 BUMDes. Sebaran 87 BUMDes tersebut sebagai berikut:

No.	Pemda	Jumlah BUMDes
1	Kabupaten Badung	21
2	Kabupaten Bangli	7
3	Kabupaten Buleleng	18
4	Kabupaten Gianyar	8
5	Kabupaten Jembrana	4
6	Kabupaten Karangasem	3
7	Kabupaten Klungkung	6
8	Kabupaten Tabanan	11
9	Kota Denpasar	9
Jumlah		87

Realisasi dan capaian IKK Tahun 2023 sebanyak 87 BUMDes meningkat 28 BUMDes dari realisasi Tahun 2022 sebanyak 59 BUMDes. Realisasi IKK tahun 2023 telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2024 sejumlah 38 BUMDes.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait tata kelola BUMDes serta mendorong penggunaan Aplikasi Forsa BUM Desa.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.10.



2.4.5. Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa

IKK “Jumlah BUMDes yang Mampu Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa” menunjukkan kemampuan BUMDes yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan/ perekonomian desa berupa sumbangan Pendapatan Asli Desa (PA Desa). Kegiatan untuk mendukung IKK ini antara lain kegiatan sosialisasi/ pembinaan/pendampingan pengembangan potensi desa dan akuntabilitas tata kelola keuangan BUM Desa.

Realisasi IKK pada tahun 2023 sebanyak 77 BUMDes atau 385% dari target sebanyak 20 BUMDes. Sebanyak 77 BUMDes yang telah memberikan kontribusi pada perekonomian desa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan dengan nilai PA Desa sebesar Rp2.154.901.239,29 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah BUMDes yg memiliki PA Desa	Jumlah PA Desa (Rp)
1	Kabupaten Badung	19	552.582.849,00
2	Kabupaten Bangli	7	215.412.444,27
3	Kabupaten Buleleng	16	314.355.554,27
4	Kabupaten Gianyar	5	80.677.928,75
5	Kabupaten Jembrana	4	126.782.692,00
6	Kabupaten Karangasem	2	70.033.991,00
7	Kabupaten Klungkung	5	44.081.658,00
8	Kabupaten Tabanan	10	182.262.523,00
9	Kota Denpasar	9	568.711.599,00
	Jumlah	77	2.154.901.239,29



Tiga BUMDes dengan kontribusi nilai PA Desa terbesar yakni Bumdesa Manik Sedana Kutuh, Bina Mitra Sejahtera, dan Bumdesa Kertha Bhuana Lestari Pererenan. Ketiga BUMDes tersebut berada di Kabupaten Badung.

Realisasi maupun capaian IKK ini meningkat sebanyak 67 BUMDes dari realisasi tahun 2022 sebanyak 10 BUMDes. Namun tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024, karena belum terdapat IKK tersebut pada saat penyusunan Renstra 2020-2024. Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait tata kelola BUMDes.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMDes yang Mampu Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.11.



5

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi" diindikasikan dalam capaian empat IKK, yaitu:

1. Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
2. Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti
3. Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
4. Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

Tabel 3.12. – Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi					
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100	100	100,00	■
5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	85	100	117,65	■
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	3	100,00	■
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	2	2	100,00	■
Rerata Capaian					104,41	

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mendukung efektivitas pengendalian korupsi. Dengan demikian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” telah melampaui target dengan capaian sebesar 104,41% dari target kinerja tahun 2023. Uraian masing-masing IKK sasaran kegiatan ini sebagai berikut:

2.5.1. Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang berorientasi represif dalam konteks pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN),



pemberian keterangan ahli, dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi.

Yang dimaksud K/L/P/BU menindaklanjuti hasil pengawasan represif dalam indikator ini adalah K/L/P/BU dan atau instansi penegak hukum yang meminta penugasan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil audit.

Dalam hal penerimaan penugasan yang bersumber dari APH, tindak lanjut dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi. Indikator Kinerja tersebut diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi}}{\text{Jumlah penugasan pengawasan represif}}$$

Realisasi IKK "Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" pada tahun 2023 sebesar 100% atau 100% dari target. Realisasi tersebut terdiri dari hasil pengawasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas 2 kasus dugaan TPK, Audit Investigasi sebanyak 1 kasus, pemberian keterangan ahli di persidangan sebanyak 7 kali dan pemberian keterangan ahli di hadapan penyidik sebanyak 4 kali, yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Realisasi maupun capaian IKK "Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" sebesar 100%, sama dengan realisasi tahun 2022 dan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 100%.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain menginventarisir kasus di Provinsi Bali yang telah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yang memiliki potensi dapat dilakukan pemberian keterangan ahli di persidangan dan berkoordinasi dengan APH untuk pemberian keterangan ahli.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.11.



2.5.2. Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Upaya pencegahan dan pengendalian korupsi tersebut dapat diklasifikasi dalam tiga strategi: edukatif, preventif dan represif. Strategi edukatif bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran informal yang terstruktur. Strategi ini menjadikan pembelajaran sebagai faktor kunci pemberantasan korupsi, disamping proses preventif dan represif. Proses ini dilaksanakan melalui pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Melalui pembelajaran informal yang terstruktur akan terjadi proses interaksi pemikiran dan pengetahuan, melahirkan individu yang mengerti dan memahami korupsi dan anti korupsi, selanjutnya termotivasi untuk melakukan tindakan anti korupsi melalui sarana sistem pengaduan internal. Dengan berjalannya waktu, melalui proses interaksi peserta belajar di lingkungan organisasinya diharapkan terjadi proses pembiasaan perilaku anti korupsi yang mengarah pada pembentukan budaya organisasi anti korupsi.



Strategi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan sistem yang mampu mengendalikan korupsi melalui *Fraud Control Plan (FCP)* maupun *Fraud Risk Assessment (FRA)*. Sistem diibaratkan sebagai lingkungan yang memiliki daya cegah bagi individu yang memiliki motivasi bertindak koruptif. Berbagai atribut dalam *FCP* dirancang untuk mewujudkan lingkungan yang anti korupsi tersebut.

IKK “Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti” diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah KLPBU yang menindaklanjuti rekomendasi}}{\text{Jumlah KLBUSasaran pengawasan edukatif dan preventif}}$$

Realisasi IKK ini pada tahun 2023 sebesar 100% atau 117,65% dari target IKK tahun 2023 sebesar 85%. Dari tujuh KLPBU sasaran telah menindaklanjuti rekomendasi, sebagai berikut:

- a. MPAK, dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai sasaran kegiatan.
- b. Bimbingan Teknis *Fraud Control Plan (FCP)*, dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai sasaran kegiatan.
- c. Bimbingan Teknis Pengukuran Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebanyak 3 Pemda, yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan, Karangasem dan Jembrana.
- d. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assesment (FRA)*, dilaksanakan sebanyak sembilan kegiatan dengan enam KLPBU, yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- e. Bimtek *FRA* pada RSUD Tk II Udayana dan RSUD Kabupaten Tabanan.

Realisasi IKK tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% dan telah melampaui target akhir renstra tahun 2024 sebesar 90%.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain perlu berkoordinasi dengan K/L/P/K yang berpotensi termotivasi untuk melakukan tindakan anti korupsi.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.13.



2.5.3. Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

IKK "Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik" menunjukkan besarnya skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan (*implementedness*) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP terintegrasi disamping pembobotan penilaian atas SPIP, kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI). Pengendalian korupsi/kecurangan atau dikenal dengan *Fraud Control Plan (FCP)* akan bermuara pada efektivitas pengendalian korupsi, karena atribut *FCP* merupakan indikator dari IEPK. Membangun *FCP* berarti meningkatkan pencapaian IEPK. IKK "Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik" diukur dengan jumlah pemda yang mendapatkan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi minimal sebesar 3,000.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian IEPK dalam rangka mencapai target kegiatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Provinsi Bali, Perwakilan BPKP Provinsi Bali



melakukan bimbingan teknis peningkatan IEPK pada pemerintah daerah di Bali.

Dalam rangka mengawal dan meningkatkan IEPK pada pemerintah daerah di Bali, pada tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan pengawasan antara lain:

- a. Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- b. Bimbingan Teknis *Fraud Control Plan (FCP)* pada Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- c. Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebanyak 3 (tiga) Pemda, yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan, Karangasem dan Jembrana.
- d. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment (FRA)*, dilaksanakan sebanyak sembilan kegiatan dengan enam KLPBU, yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- e. Bimbingan Teknis *Fraud Risk Assessment* pada RSUD Udayana dan RSUD Kabupaten Tabanan.

Hambatan yang dialami pemda dalam proses peningkatan efektivitas pengendalian korupsi antara lain:

- ❖ Program pembelajaran anti korupsi berupa sosialisasi/*workshop/lokakarya/focus group discussion* kepada pejabat dan staf, pengguna layanan serta penyedia barang belum diselenggarakan secara terstruktur dan terjadwal;
- ❖ Kebijakan dan struktur pengendalian kecurangan belum disusun secara sistematis dalam rangka peningkatan IEPK parameter kebijakan antikorupsi;
- ❖ Kegiatan asesmen risiko mencakup identifikasi skenario/modus dan penyebab korupsi, menghasilkan peta risiko korupsi, dan menghasilkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) spesifik sebagai langkah mitigasi belum diterapkan pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- ❖ Kurangnya keterlibatan para pimpinan OPD dan pejabat terkait menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya organisasi anti korupsi, diharapkan terbentuk persepsi bersama

bahwa yang dijadikan acuan utama perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional (etika prinsip).

Realisasi IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” sebanyak 3 (tiga) Pemda pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00% berdasarkan hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi yaitu Pemerintah Provinsi Bali (skor 3,000), Kota Denpasar (skor 3,000) dan Kabupaten Bangli (skor 3,000).

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.14.



Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

1. Bimbingan teknis, *FGD*, sosialisasi *FRA*, *FCP* dan workshop anti korupsi untuk mendorong peningkatan nilai IEPK.
2. Mendorong penyusunan kebijakan pengendalian kecurangan terutama komitmen pimpinan Kepala Daerah se-Provinsi Bali untuk melakukan internalisasi kebijakan tersebut.
3. Menginformasikan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan internalisasi budaya organisasi terkait masalah penguatan nilai-nilai integritas pada semua pegawai dan penumbuhkembangan paradigma/nilai baru antikorupsi yang terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.



4. Mendorong pembentukan MPAK dan Komunitas Pembelajar Antikorupsi (KompAK) dan bukti nyata edukasi yang telah dilakukan oleh tim KompAK.

2.5.4. Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

IKK “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” menunjukkan besarnya skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan nilai atas tiga pilar indikator: kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi. Hasil pengujian bukti dan analisis data setiap indikator disimpulkan dalam skala 100% dan dikonversi dalam predikat efektivitas pengendalian korupsi. Predikat baik dengan presentase $70,00\% < \text{capaian} \leq 90,00\%$.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian IEPK dalam rangka mencapai target kegiatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Provinsi Bali, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan pengukuran *baseline* Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada BUMN/BUMD di wilayah Provinsi Bali, yaitu pada Bank BPD Bali dan PDAM Tirta Mangupura Kabupaten Badung.

Hasil pengukuran *baseline* IEPK pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali memperoleh nilai sebesar 94,36% atau efektivitas pengendalian korupsi “sangat baik”. Sedangkan hasil pengukuran *baseline* IEPK pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung memperoleh nilai sebesar 70,65% atau efektivitas pengendalian korupsi “baik”

Berdasarkan hasil pengukuran *baseline* IEPK tersebut, realisasi IKK Badan Usaha dengan IEPK predikat baik adalah 100% dari target IKK tahun 2023 sebanyak dua Badan Usaha.

Realisasi IKK tahun 2023 sebanyak dua badan usaha tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 karena tidak terdapat IKK ini pada tahun 2022. Realisasi tahun 2023 mencapai 100% dari target akhir renstra tahun 2024 sebanyak dua badan usaha. Dengan demikian perlu upaya lebih keras lagi untuk mencapai target tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.14.

Grafik 3.15. - IKK 5.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik



Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Mendorong komitmen para Direktur BUMN/BUMD untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menerbitkan kebijakan pengendalian kecurangan/ korupsi, penguatan *Fraud Control Plan (FCP)*, penguatan SPIP sehingga terwujud budaya organisasi anti korupsi.
2. Mengedukasi masyarakat dan BUMN/BUMD mengenai dampak korupsi terhadap kelancaran pembangunan nasional melalui kegiatan sosialisasi pembelajaran anti korupsi, forum/rapat-rapat pimpinan, oleh Satuan Pengawas Intern yang dibentuk oleh BUMN/BUMD.
3. Memberdayakan Satuan Kerja Audit Internal dan Anti *Fraud* atau Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam merespon kejadian kecurangan di wilayah masing-masing baik melalui audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara maupun pemberian keterangan ahli.
4. Penguatan kapabilitas SPI BUMN/BUMD, terutama masalah SDM, anggaran dan peningkatan peran layanannya.



6

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Pencapaian Sasaran Kegiatan Perwakilan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU” ditunjukkan oleh pencapaian 13 indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3
6. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3
7. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
8. Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel
9. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
10. Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3
11. Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3
12. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
13. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Indikator yang terkait dengan tugas Bidang Akuntan Negara antara lain: Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3, Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3, Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3, dan Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3. Realisasi kinerja empat IKK tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.6.1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Tiga komponen penilaian yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif, meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Komponen *enabler* terdiri dari 5 elemen yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya

dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola. Komponen Aktivitas Pengawasan merupakan peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas pengawasan intern berupa asurans dan jasa konsultansi. Sedangkan kualitas hasil pengawasan di atas terlihat dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan *stakeholders* lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultansi APIP.

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan sendiri/penilaian mandiri oleh APIP K/L/Pemda menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP, yang selanjutnya dievaluasi oleh BPKP.

IKK "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" mencerminkan bahwa hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

Inspektorat Provinsi Bali telah berada pada level 3. Dengan demikian, realisasi IKK "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" pada tahun 2023 sebanyak 1 APIP atau tercapai 100% dari target sebesar 1 APIP.

Realisasi IKK Tahun 2023 sebanyak 1 APIP Provinsi, sama dengan realisasi tahun 2022 dan target akhir Renstra Tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.16.



2.6.2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Sebagaimana IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3, IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” juga mencerminkan bahwa hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

Realisasi IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” di Provinsi pada tahun 2023 sebanyak 9 APIP atau tercapai 112,50% dari target sebesar 8 APIP. APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagaimana Tabel 3.10 berikut:

Tabel 10 – Level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Nama APIP	Level	Status
APIP yang berada pada level 3			
1.	Inspektorat Kabupaten Badung	3	Telah Terbit SP Deputi
2.	Inspektorat Kabupaten Tabanan	3	
3.	Inspektorat Kabupaten Klungkung	3	
4.	Inspektorat Kota Denpasar	3	
5.	Inspektorat Kabupaten Gianyar	3	
6.	Inspektorat Kabupaten Bangli	3	
7.	Inspektorat Kabupaten Buleleng	3	

No.	Nama APIP	Level	Status
APIP yang berada pada level 3			
1.	Inspektorat Kabupaten Jembrana	3	*Menunggu Terbit SP Deputi
2.	Inspektorat Kabupaten Karangasem	3	

Topik Kapabilitas APIP yang memerlukan perbaikan:

No.	Elemen	Nama Topik	Jumlah APIP
1	Elemen Pengelolaan SDM	Perencanaan SDM	-
		Pengembangan SDM	-
2	Elemen Praktik Profesional	Perencanaan Pengawasan	-
		Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	-
3	Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Rencana kerja dan anggaran APIP	-
		Pelaksanaan Anggaran	-
		Sistem Pengukuran Kinerja APIP	-
		Pelaporan kepada Managemem K/L/D	-
4	Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi	Hubungan APIP dengan Manajemen	-
		Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	-
5	Elemen Peran dan Layanan	Audit Ketaatan	-
		Audit Kinerja	1
		Jasa Konsultansi	-

Realisasi IKK tahun 2023 sebanyak 9 APIP, meningkat 40% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebanyak 7 APIP. Realisasi tahun 2023 mencapai 100% dari target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 9 Pemda. Dengan demikian capaian kinerja ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

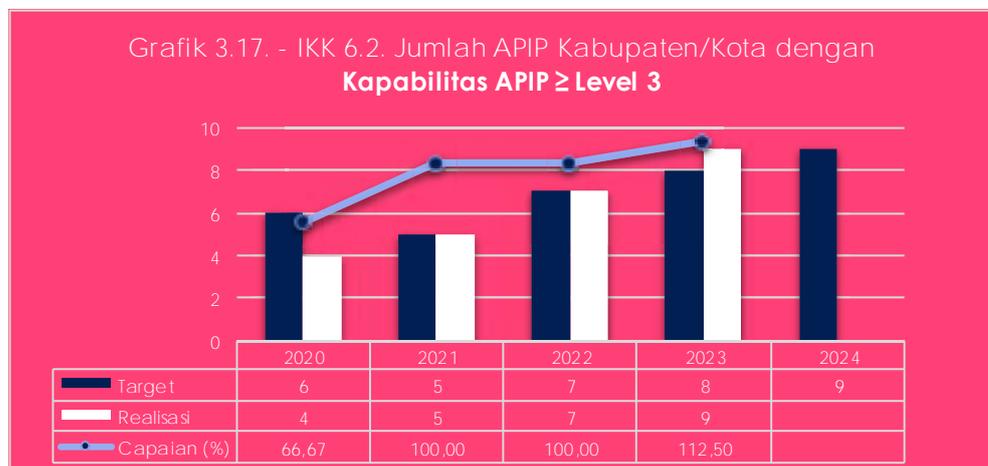
Rencana tindak selanjutnya dalam meningkatkan kapabilitas APIP Pemda antara lain:

1. Melakukan koordinasi secara intensif untuk membangun komitmen manajemen Pemda dan pimpinan APIP untuk:



- a. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemenuhan kebutuhan SDM dan penyediaan anggaran yang memadai;
 - b. Melaksanakan pengawasan dengan fokus mencapai keberhasilan visi dan misi kepala daerah dengan mempertimbangkan risiko program;
 - c. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat dan sertifikasi profesi.
2. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengawasan antar bidang untuk kegiatan yang berkaitan di intern Perwakilan BPKP Provinsi Bali agar dapat membimbing dan mengawal Pemda dalam mengambil langkah tepat dan selaras sehingga tujuan pengawasan dan manajemen Pemda dapat dicapai secara efektif;
 3. Melakukan pemantauan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pemda;
 4. Meningkatkan frekuensi kegiatan pendampingan peningkatan kapabilitas APIP.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.17.



2.6.3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Maturitas SPIP K/L/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Level 3 merupakan tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/Pemda. Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja

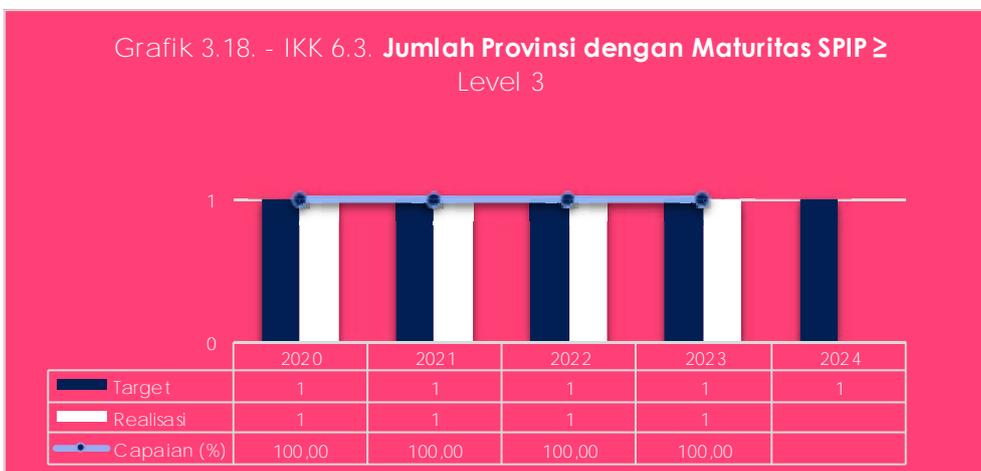
yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah.

IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah Provinsi dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan menjumlahkan provinsi pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Realisasi IKK “Jumlah provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” tahun 2023 adalah sebanyak 1 Pemda atau tercapai 100% dari target 1 Pemda.

Realisasi IKK sebanyak 1 pemerintah provinsi, sama dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.18.



2.6.4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60



Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Realisasi IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" tahun 2023 adalah sebanyak 9 kabupaten/kota atau tercapai 100% dari target 9 kabupaten/kota.

Realisasi IKK sebanyak 9 kabupaten/kota, sama dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 9 kabupaten/kota. Dengan demikian capaian ini perlu dipertahankan.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.19.



2.6.5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

IKK "Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3" mencerminkan jumlah Pemda yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Pemerintah Provinsi yang mengimplementasikan pengelolaan atau manajemen risiko.

Realisasi IKK "Jumlah Pemerintah Provinsi dengan MRI \geq Level 3" tahun 2023 adalah sebanyak satu pemerintah provinsi atau tercapai 100% dari target satu pemerintah provinsi.

Realisasi IKK ini sebanyak satu Pemerintah Provinsi, sama dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.20.



2.6.6. Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

IKK "Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3" mencerminkan jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Pemda Kab/Kota yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

Realisasi IKK "Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3" tahun 2023 adalah sebanyak tiga kabupaten/kota atau tercapai 75% dari target empat kabupaten/kota. Ketiga pemerintah daerah dengan MRI \geq Level 3 yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan. Sampai dengan Desember 2023 telah dilaksanakan bimbingan teknis manajemen risiko pada empat pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem.

Realisasi IKK sebanyak tiga kabupaten/kota, sama dengan realisasi tahun 2022. Realisasi IKK Tahun 2023 mencapai 60% dari target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak lima kabupaten/kota. Dengan demikian kinerja dalam mendukung pencapaian target IKK ini perlu ditingkatkan lagi.



Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.21.



2.6.7. Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah" menunjukkan tingkat akuntabel (efisien dan efektif) pemda dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. IKK ini diukur dengan menjumlahkan pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Realisasi tahun 2023 sebanyak tiga Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB atau 75% dari target Tahun 2023 sebanyak empat pemda. Perolehan opini dan nilai SAKIP Pemda di Provinsi Bali yang mendapat opini WTP dan SAKIP BB adalah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.11. – Opini LKPD dan Hasil Evaluasi SAKIP Pemda

No.	Pemerintah Daerah	Opini LKPD Tahun 2022	Hasil Evaluasi SAKIP TA 2022
Predikat WTP dan SAKIP BB			
1	Provinsi Bali	WTP	BB
2	Kota Denpasar	WTP	BB
3	Kabupaten Badung	WTP	BB

No.	Pemerintah Daerah	Opini LKPD Tahun 2022	Hasil Evaluasi SAKIP TA 2022
Predikat WTP dan SAKIP B			
1	Kabupaten Tabanan	WTP	B
2	Kabupaten Klungkung	WTP	B
3	Kabupaten Gianyar	WTP	B
4	Kabupaten Buleleng	WTP	B
5	Kabupaten Jembrana	WTP	B
6	Kabupaten Karangasem	WTP	B
7	Kabupaten Bangli	WTP	B

Realisasi IKK ini sama dengan realisasi tahun 2022 sebanyak tiga Pemda.

Realisasi IKK sejumlah tiga pemda atau 30% dari target akhir Renstra tahun 2024 sebanyak 10 pemda. Dengan demikian diperlukan upaya lebih untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain mendorong Pemerintah Daerah untuk:

- 1) Memantau keselarasan perencanaan dan penganggaran setiap tahun dengan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan perencanaan pembangunan nasional;
- 2) Membangun mekanisme/sistem informasi yang memadai guna memantau keselarasan perencanaan dan pemenuhan kriteria SMART pada indikator dan target kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.22.





2.6.8. Jumlah Desa yang Pengelolaannya Keuangannya Akuntabel

IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaannya Keuangannya Akuntabel” menunjukkan tingkat ketaatan pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan. IKK dihitung dengan menjumlahkan desa yang telah mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Realisasi IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaannya Keuangannya Akuntabel” tahun 2023 sebanyak 636 desa atau seluruh desa di Provinsi Bali telah menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya dan telah melaksanakan secara *online*. Dengan demikian capaian IKK ini sebesar 2.544% dari target 25 desa.

Faktor pendukung capaian IKK ini adalah:

1. BPKP Provinsi Bali memiliki grup Parikrama Desa yang merupakan sarana komunikasi dan konsultasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat maupun Desa;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di setiap pemerintah daerah mendukung pelaksanaan siskeudes;
3. Admin siskeudes di setiap pemerintah daerah aktif melaksanakan diskusi dan konsultasi terkait kendala yang dihadapi dalam implementasi siskeudes.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Menyediakan media konsultasi perangkat daerah yang terkait dengan pembinaan desa dalam rangka pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes;
2. Melakukan monitoring realisasi belanja desa setiap semester;
3. Melakukan evaluasi setiap triwulan pada beberapa desa sampel;
4. Meningkatkan pemantauan atas penggunaan aplikasi Siskeudes secara *online*.

Realisasi IKK ini sama dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 636 desa menyusun laporan pertanggungjawaban. Realisasi IKK tahun 2023 sebanyak 636 desa, Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target renstra karena belum terdapat target IKK ini pada Renstra Tahun 2020-2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.22.



2.6.9. Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai

IKK "Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai" mencerminkan sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan. IKK ini diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengelolaan aset desa sebanyak 180 desa telah menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai. Dengan demikian, pada tahun 2023 IKK ini terealisasi 180 desa atau 720% dari target 25 desa.



Realisasi IKK 180 desa atau 28,30% dari target akhir Renstra tahun 2024 sebanyak 636 desa. Dengan demikian diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan aset desa sembari memberi pemahaman kepada perangkat desa akan pentingnya pengelolaan aset desa yang baik;
2. Menerima konsultasi perangkat daerah yang terkait dengan pembinaan desa dalam rangka pengelolaan aset desa.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.23.



2.6.10. Jumlah BUMD dengan MRI > Level 3

BUMD dengan MRI \geq Level 3 tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.

IKK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3” mencerminkan jumlah BUMD yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan BUMD yang mengimplementasikan pengelolaan risiko/manajemen risiko dengan capaian MRI \geq Level 3.

Realisasi IKK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3” tahun 2022 adalah sebanyak 5 BUMD atau tercapai 250% dari target 2 BUMD. Hasil penilaian BUMD dengan MRI level 3 diperoleh berdasarkan hasil *mapping* penilaian penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Rendal Pusat Bidang Akuntan Negara dan evaluasi maturitas penerapan manajemen risiko oleh perwakilan. BUMD di wilayah Provinsi Bali dengan MRI \geq Level 3, sebagai berikut:

No.	Nama BUMD	Level Maturitas MR
1	Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung	3,00
2	Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng	3,09
3	Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar	3,00
4	Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan	3,00
5	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	3,00

Realisasi IKK ini meningkat sebanyak 4 BUMD dibandingkan tahun 2022 sebanyak 1 BUMD. Realisasi tersebut juga telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 4 BUMD, namun tetap diperlukan upaya lebih keras lagi dalam meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, capaian kinerja ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.



Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk mendorong BUMD dalam penerapan manajemen risiko.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.25.



2.6.11. Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3

BLU/D dengan MRI \geq Level 3 tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.

IKK "Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3" mencerminkan jumlah BLU/D yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan BLU/D yang mengimplementasikan pengelolaan risiko/manajemen risiko dengan capaian MRI \geq Level 3.

Realisasi IKK "Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3" tahun 2023 adalah sebanyak 12 BLUD atau tercapai 120% dari target 10 BLU/D. Hasil penilaian BLU/D dengan MRI level 3 diperoleh berdasarkan hasil mapping penilaian penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Rendal Pusat Bidang Akuntan Negara dan evaluasi maturitas manajemen risiko oleh perwakilan. BLU/D dengan MRI \geq Level 3 di wilayah Provinsi Bali, sebagai berikut:

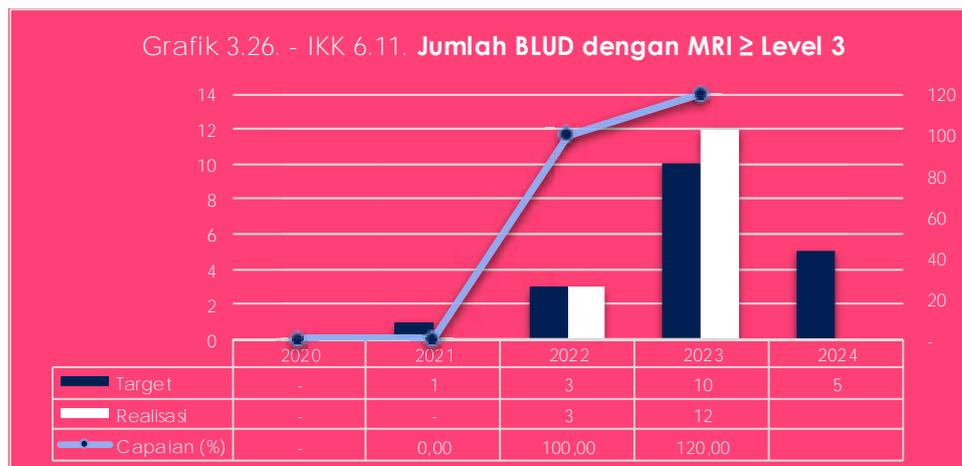


No.	Nama BLUD	Level	Skor Nilai Evaluasi/Mapping
1	BLUD RSUD Kabupaten Tabanan	3	3,3
2	BLUD RSUD Kabupaten Buleleng	3	3,53
3	BLUD RSUD Kabupaten Bangli	3	3,22
4	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah	3	95,45
5	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali	3	81,82
6	RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung	3	81,82
7	RS Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar	3	90,91
8	RS Umum Daerah Kabupaten Klungkung	3	93,18
9	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar	3	95,45
10	RS Jiwa Provinsi Bali	3	100
11	RS Khusus Mata Bali Mandara	3	81,82
12	RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	3	100

Realisasi IKK Tahun 2023 meningkat sebanyak 9 BLUD dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebanyak 3 BLUD. Jika melihat target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 5 BLUD, realisasi tahun 2023 telah melampaui target. Dengan demikian, capaian kinerja ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk mendorong BLUD dalam penerapan manajemen risiko.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.26.



2.6.12. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Penilaian Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) dijabarkan ke dalam tiga komponen, enam elemen dan 18 topik atas aspek aspek kebijakan, implementasi, dan hasil. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *asurans* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

IKK "Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" mencerminkan kualitas kapasitas dan kapabilitas SPI BUMD dalam menjalankan peran sebagai pengawas intern pada BUMD masing-masing. IKK ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3.

Realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" pada tahun 2023 sebanyak 5 BUMD atau tercapai 500% dari target sebesar 1 BUMD. Hasil penilaian BUMD dengan Kapabilitas SPI level 3 diperoleh berdasarkan hasil *mapping* penilaian tingkat kapabilitas SPI pada BUMD di wilayah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Rencal Pusat Bidang Akuntan Negara dan *assessment* oleh perwakilan. BUMD di wilayah Provinsi Bali dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 yaitu BUMD Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar, Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar, Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan, Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar, dan Perumda Gianyar.

Realisasi IKK dan capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena tidak terdapat target IKK pada tahun tersebut. Jika melihat target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak tiga BUMD, realisasi tahun ini telah melampaui dan diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja pada tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan *assessment* kapabilitas SPI untuk mendorong BUMD dalam peningkatan kapabilitas SPI.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.27.



2.6.13. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Penilaian Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) dijabarkan ke dalam tiga komponen, enam elemen dan 18 topik atas aspek aspek kebijakan, implementasi, dan hasil. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan asurans secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

IKK "Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" mencerminkan kualitas kapasitas dan kapabilitas SPI BLU/D dalam menjalankan peran sebagai pengawas intern pada BLU/BLUD masing-masing. IKK ini diukur dengan menghitung jumlah BLU/BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3.

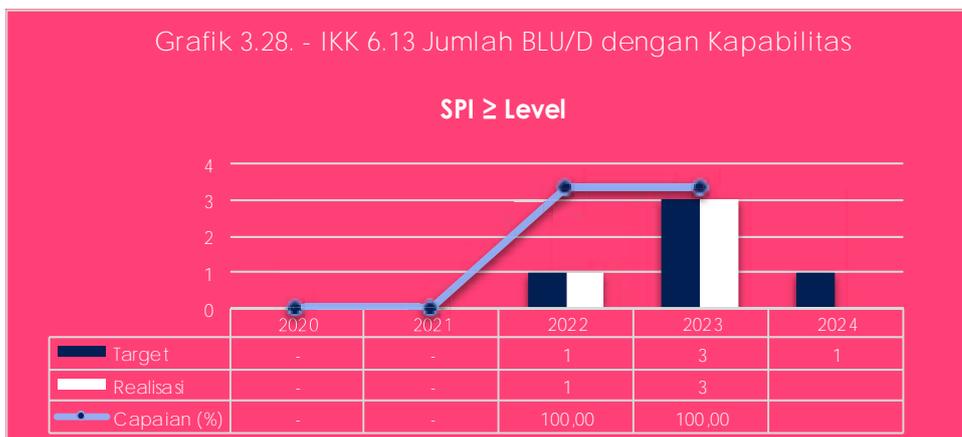


Realisasi IKK "Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" pada tahun 2023 sebanyak 3 BLU/D atau tercapai 100% dari target sebesar 3 BLU/D. Hasil penilaian BLU/D dengan Kapabilitas SPI level 3 diperoleh berdasarkan hasil mapping penilaian tingkat kapabilitas SPI pada BLU/D di wilayah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Rencal Pusat Bidang Akuntan Negara. BLU/D di wilayah Provinsi Bali dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 yaitu Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, BLUD RSUD Kabupaten Klungkung, dan BLUD RS Jiwa Provinsi Bali.

Realisasi IKK ini meningkat sebanyak 2 BLU/D dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 1 BLU/D. Jika melihat target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak satu BLU/D, realisasi tahun ini telah melampaui dan diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja pada tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan assessment kapabilitas SPI untuk mendorong BLU/BLUD dalam peningkatan kapabilitas SPI.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.28.





7

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan” diindikasikan dalam capaian tujuh IKK, yaitu:

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
2. Nilai SAKIP Unit Kerja
3. Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)
4. Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)
5. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja
6. Skor IKPA Unit Kerja
7. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Tabel 3.12. – Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
VII Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan						
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	83,51	111,35	■
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	83,10	101,34	■
7.3	Persentase efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	90,66	129,51	■
7.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100	100	100,00	■
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	90,12	120,16	■
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	95,84	100,88	■
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	99,86	124,83	■
Rerata Capaian					118,09	



Tabel 3.12. menunjukkan tata kelola Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah terselenggara sesuai target. Dengan demikian sasaran kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan” dengan capaian sebesar 118,09% dari target kinerja tahun 2023. Uraian masing-masing IKK sasaran kegiatan ini sebagai berikut:

2.7.1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Penetapan IKK “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” merupakan salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. IKK Skor Zona Integritas, diukur sesuai dengan kertas kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2019 (menggunakan nilai sesuai laporan hasil evaluasi dari Kemen PANRB/ nilai sesuai hasil penilaian Inspektorat/total nilai Komponen Pengungkit atas penilaian mandiri).

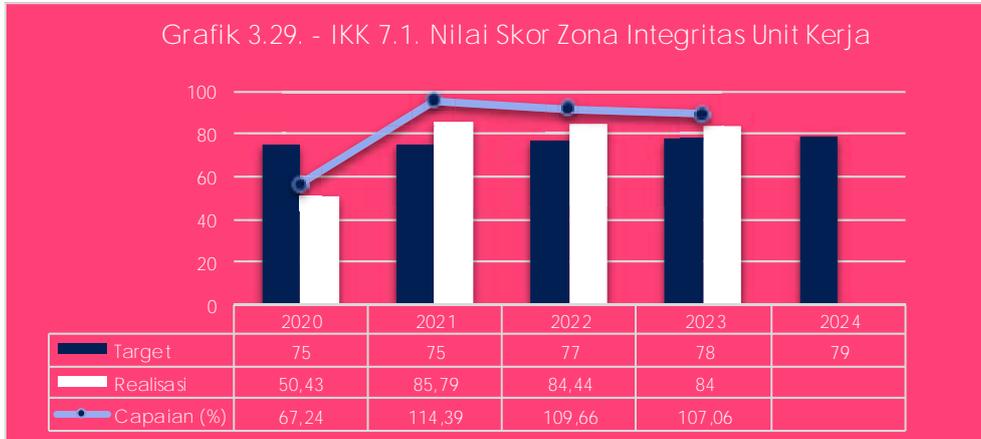
Realisasi IKK “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” pada tahun 2023 sebesar 83,51 skala 100 atau 111,35% dari target nilai 75 skala 100. Nilai skor tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yaitu Inspektorat BPKP.

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja mengalami tren penurunan. Hal ini disebabkan inovasi perubahan yang dilakukan belum sepenuhnya dirasakan *impactnya* oleh *stakeholder*.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Mengoptimalkan fungsi satuan tugas pembangunan zona integritas untuk meningkatkan skor dan membangun inovasi layanan;
2. Melakukan perbaikan prosedur serta implementasinya dalam setiap *business process* kegiatan.
3. Mengembangkan inovasi secara terus menerus untuk memastikan efektifitasnya terhadap kebutuhan dan ekspektasi *stakeholders* sehingga kebermanfaatannya inovasi yang dibangun langsung dirasakan manfaatnya oleh pengguna.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.29.



2.7.2. Nilai SAKIP Unit Kerja

IKK "Nilai SAKIP Unit Kerja" untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus untuk mendorong peningkatan kinerja instansi. Penilaian implementasi SAKIP dengan cakupan: 1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan. Realisasi IKK diperoleh dari Nilai SAKIP Unit Kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri (bila belum ada penilaian dari Inspektorat).

Realisasi IKK "Nilai SAKIP Unit Kerja" pada tahun 2023 dengan nilai 83,10 (kategori A) atau 101,34% dari target nilai 82 (skor skala 100). Nilai tersebut merupakan hasil penilaian mandiri perwakilan atas implementasi SAKIP tahun 2023 dan telah dievaluasi oleh Inspektorat sesuai Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 tanggal 7 November 2023.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja dengan menindaklanjuti saran perbaikan dari hasil evaluasi Inspektorat diantaranya:



1. Melaksanakan rencana tindak implementasi SAKIP sebagaimana hasil evaluasi SAKIP Inspektorat;
 2. Melakukan koordinasi dengan Biro MKOT terkait revisi Renstra.
- Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai SAKIP Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.30.



2.7.3. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

IKK "Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)" mencerminkan efektivitas pengendalian dan RTP yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Realisasi efektivitas pengendalian intern (SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali) Tahun 2023 sebesar 90,66% atau 129,51% dari target tahun 2023 sebesar 70%. Pada tahun 2023, terdapat 165 pengendalian yang efektif dari 182 pengendalian existing yang ada. Capaian IKK "Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)" mengalami tren peningkatan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 87,42%, dan tahun 2021 sebesar 75,86%. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan unit kerja dalam merealisasikan kegiatan pengendalian yang efektif dalam penyelenggaraan SPIP. Realisasi Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024 karena tidak terdapat IKK ini. Dengan demikian diperlukan penyesuaian dan revisi renstra perwakilan mengikuti dengan perubahan indikator kinerja.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Perwakilan;
2. Memastikan Rencana Tindak Pengendalian seluruhnya telah efektif;
3. Melakukan monitoring perkembangan penyelenggaraan SPIP secara berkala.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.31.



2.7.4. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

IKK "Persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI unit kerja)" mencerminkan jumlah realisasi Rencana Tindak Pengendalian yang diselesaikan dibandingkan jumlah RTP setahun. Pengukuran IKK dilakukan menggunakan aplikasi *Bewise*.

Persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja) Tahun 2023 sebesar 100% sesuai target kinerja pada tahun 2023. RTP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2023 sebanyak 22 RTP atau seluruhnya telah terlaksana.

Realisasi dan capaian IKK "Persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI unit kerja)" sama dengan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2021 sebesar 100%. Realisasi IKK Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target renstra karena belum terdapat target IKK ini pada Renstra Tahun 2020-2024.



Realisasi dan capaian IKK "Persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI unit kerja)" sama dengan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi IKK Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target renstra karena belum terdapat target IKK ini pada Renstra Tahun 2020-2024.

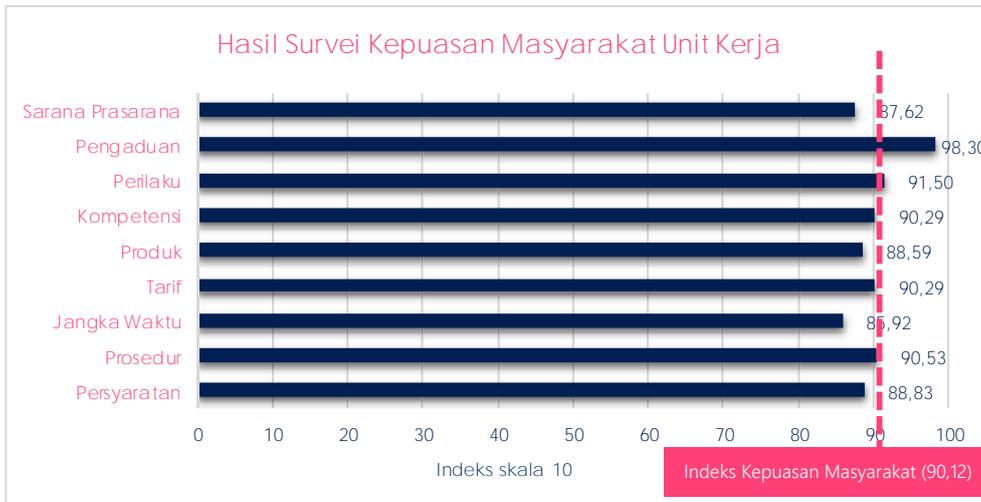
Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.32.



2.7.5. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

IKK "Indeks Kepuasan Layanan Eksternal Unit Kerja" merupakan skor indeks kepuasan atas layanan BPKP kepada *stakeholder* guna mengetahui peningkatan kualitas layanan BPKP pada unit kerja *stakeholders*. IKK ini diukur menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan perwakilan.

Realisasi IKK "Indeks Kepuasan Layanan Eksternal Unit Kerja" tahun 2023 dengan nilai 90,12 dari skala 100 atau 120,16% dari target nilai 75 dari skala 100. Nilai tersebut merupakan hasil survei kepada *stakeholder/masyarakat* dengan pertanyaan terkait persyaratan, prosedur, jangka waktu, tarif, produk, kompetensi, perilaku, pengaduan, dan sarana prasarana. Dengan nilai untuk setiap unsur pengukuran sebagai berikut:



Realisasi IKK tahun 2023 sebesar 90,12 meningkat 0,02 skala dari realisasi kinerja tahun 2022 dengan nilai 90,10. Realisasi tahun 2023 telah melampaui target akhir Renstra tahun 2024 pada nilai 81 dari skala 100. Capaian kinerja ini harus dipertahankan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan:

1. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerjasama yang baik dengan para *stakeholders* dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan negara/daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan;
2. Lebih cermat lagi dalam memahami kebutuhan *stakeholders* sehingga kehadiran BPKP lebih dirasakan manfaatnya.

Perbandingan target dan realisasi IKK " Indeks Kepuasan Layanan Eksternal Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.33.





2.7.6. Skor IKPA Unit Kerja

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKK "Skor IKPA Unit Kerja" bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan laporan keuangan. Pengukuran IKK ini berdasarkan hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan.

Realisasi IKK "Skor IKPA Unit Kerja" pada tahun 2023 sebesar 95,84 dari skala 100 atau 100,88% dari target 95,00. Realisasi tersebut merupakan hasil penilaian pelaksanaan anggaran tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan sesuai data aplikasi OM SPAN.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Mengimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh BPKP Pusat secara *realtime* untuk *monitoring* pelaksanaan anggaran dan memperlancar pertanggungjawaban kegiatan;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh bidang/bagian, terutama dalam perencanaan kas dan pelaksanaan anggaran; dan
3. Meningkatkan ketelitian dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan, revisi anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Skor IKPA Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.34.



2.7.7. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

IKK “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” mencerminkan tingkat pengelolaan BMN unit kerja. Pengukuran IKK ini dilakukan secara *self assessment* dengan mengisi form penilaian pengelolaan BMN, dan kemudian divalidasi oleh Biro Umum.

Nilai Pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun 2023 sebesar 99,86 dari skala 100 atau tercapai 124,83% dari target 80 skala 100. Nilai tersebut merupakan hasil *self assessment* pengelolaan BMN Perwakilan Bali yang telah divalidasi oleh Biro Umum.

Realisasi maupun capaian IKK sebesar 99,86 ini meningkat dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya dimana tahun 2022 sebesar 95,06 dan tahun 2021 sebesar 98 skala 100.

Realisasi tahun 2023 telah melampaui target akhir Renstra tahun 2024 bernilai “baik” atau nilai 80 dari skala 100. Dengan demikian capaian kinerja ini harus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja dengan senantiasa melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN serta melakukan pemantauan kondisi dan perawatan BMN secara berkala.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.35.





C. ANALISIS EFISIENSI

Rerata capaian efisiensi kegiatan operasional tahun 2023 adalah sebesar 166,91% untuk penggunaan dana dan 246,42% untuk penggunaan SDM. Secara umum, proses kegiatan operasional BPKP telah dilaksanakan secara efisien ditinjau dari penggunaan dana dan SDM. Efisiensi atau daya guna berhubungan erat dengan produktivitas, yaitu pengukuran dengan membandingkan *output* yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*). Kegiatan operasional disebut efisien bila:

1. Suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan input serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Adanya penurunan atau penghapusan biaya yang tidak perlu (*cost reduction*).

Analisis efisiensi dilakukan per sasaran kegiatan. Penyimpulan efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Efisien jika rasio efisiensi sama atau lebih besar dari 100%.
2. Belum efisien jika rasio efisiensi lebih kecil dari 100%.

Rincian hasil penghitungan efisiensi per sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. – Hasil Perhitungan Efisiensi per Sasaran Kegiatan 2023

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Capaian Input (%)		Capaian Output	Efisiensi (%)	
		Dana	SDM		Dana	SDM
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	99,85	70,02	126,15	126,34	180,15
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	99,49	86,32	108,82	109,39	126,07
3	Meningkatnya Pengawasan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	99,99	132,41	125,00	125,00	94,41



No	Sasaran Kegiatan/IKK	Capaian Input (%)		Capaian Output	Efisiensi (%)	
		Dana	SDM		Dana	SDM
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	99,95	116,90	206,49	206,60	176,64
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	99,13	47,62	104,41	105,33	219,29
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	99,93	51,31	377,04	377,30	734,87
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	99,73	55,05	118,09	118,41	214,50
Rerata Capaian		99,73	79,95	166,57	166,91	246,42



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp25.801.306.593,00 atau terserap 99,74% dari anggaran sebesar Rp25.868.406.000,00.

Rincian penggunaan anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel 3.14. Rincian penggunaan anggaran per kegiatan disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.14. – Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	16.811.349.000	16.775.768.804	99,79
2	Belanja Barang	7.978.057.000	7.952.147.789	99,68
3	Belanja Modal	1.079.000.000	1.073.390.000	99,48
	Jumlah	25.868.406.000	25.801.306.593	99,74

Tabel 3.15. – Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan

Kode Kegiatan	Jenis Belanja/RO	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
3701	Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan	3.717.407.000	3.710.408.105	99,81
FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	894.767.000	893.155.802	99,82
FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	243.505.000	243.046.438	99,81
UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	315.558.000	315.545.164	99,99
UAG.U23	Rekomendasi hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	176.789.000	176.427.000	99,80
UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	281.738.000	280.792.640	99,66
UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	91.496.000	90.595.125	99,02
UAG.U27	Rekomendasi hasil pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	103.340.000	102.736.410	99,42



Kode Kegiatan	Jenis Belanja/RO	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	23.645.000	23.644.770	99,99
FAG.031	Rekomendasi hasil pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	108.504.000	108.449.100	99,95
UAG.U41	Rekomendasi hasil pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	126.460.000	125.363.450	99,13
UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1.244.685.000	1.243.809.998	99,93
UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	106.920.000	106.842.208	99,93
3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	22.150.999.000	22.090.898.488	99,74
EBA.962	Layanan Umum	627.680.000	626.678.777	99,84
EBA.994	Layanan Perkantoran	20.444.319.000	20.390.829.711	99,74
EBB.951	Layanan Sarana Internal	79.000.000	75.000.000	94,94
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.000.000.000	998.390.000	99,84
Jumlah		25.868.406.000	25.801.306.593	99,74

Penggunaan Dana Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan beberapa tugas dan fungsi BPKP atas permintaan Pihak Ketiga (Mitra Kerja), BPKP menggunakan dana dari mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan BUMD sesuai dengan kebijakan penggunaan dana bantuan kedinasan yang diatur melalui Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Bantuan Kedinasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.15. – Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan

No	Bidang	Realisasi Dana Pihak Ketiga (Rp)
1	Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	220.242.955,00
2	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	15.659.457,00
3	Akuntan Negara	225.887.522,00
4	Investigasi	392.001.199,67
5	P3A	14.400.000,00
Jumlah		868.191.134,67

E. ANALISIS RISIKO PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PW22.2.2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (PW)	Pedoman Pengawasan Sudah Tidak Relevan Untuk Panduan Pelaksanaan Tugas	Hasil pengawasan tidak dapat dimanfaatkan mitra	2	4	13	1	Memadai	1	3	5
2	PW22.2.2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (PW)	Pedoman Pengawasan Sudah Tidak Relevan Untuk Panduan Pelaksanaan Tugas	Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti	2	4	13	1	Memadai	1	3	5
3	PW22.3.31	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (PW)	Pegawai menerima suap terkait hasil pengawasan intern	Hilangnya kepercayaan dari masyarakat	3	5	22	3	Memadai	2	3	11

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	PW22.4.1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (PW)	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	Kualitas hasil pengawasan tidak memadai atau tidak mencerminkan kondisi riil temuan atas nilai pengeluaran	4	4	19	1	Memadai	2	3	11
5	PW22.5.19	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (PW)	Hasil Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti	Kinerja perwakilan tidak tercapai sesuai target	4	4	19	2	Memadai	1	4	8
6	PW22.5.82	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (PW)	Temuan hasil pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti	tujuan pengawasan/pengawasan tidak tercapai	4	4	19	2	Memadai	2	3	11

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	PW22.5.87	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (PW)	Tim gagal memperoleh data yang dibutuhkan	Hasil pengawasan tidak optimal	3	4	17	1	Memadai	2	3	11
8	PW22.6.17	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (PW)	Stakeholder terlambat menyampaikan data/tanggapan	Hasil pengawasan tidak optimal	3	4	17	1	Memadai	2	3	11
9	PW22.6.19	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (PW)	Stakeholder tidak siap	Target capaian kinerja perwakilan tidak dapat dipenuhi	3	4	17	4	Memadai	2	4	13

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	PW22.5.6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional (PW)	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	Hasil pengawasan menjadi tidak bermanfaat	3	4	17	0	Tidak Memadai	3	4	17
11	PW22.6.23	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional (PW)	Tidak terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang dimediasi dalam menyikapi permasalahan yang ada	Penilaian negatif atas eksistensi Perwakilan BPKP	3	2	10	0	Memadai	3	2	10
12	PW22.2.2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Pedoman Pengawasan Sudah Tidak Relevan Untuk Panduan Pelaksanaan Tugas	Informasi hasil pengawasan tidak lengkap dan akurat	2	3	11	1	Memadai	1	2	3
13	PW22.2.3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Pedoman Pengawasan Memiliki Mutu Dibawah Ekspektasi	Penambahan data dan prosedur pengawasan sehingga laporan hasil	2	4	13	1	Memadai	1	4	8

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				pengawasan terlambat diterbitkan								
14	PW22.2.18	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Terdapat perubahan kebijakan eksternal yang tidak tersosialisasikan di lingkungan BPKP	Informasi hasil pengawasan tidak termanfaatkan secara optimal	3	4	17	1	Memadai	2	3	11
15	PW22.4.1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	Laporan substandar	1	2	3	1	Memadai	1	1	1
16	PW22.4.1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	Hasil pengawasan tidak relevan dengan aturan terkini	2	4	13	1	Memadai	1	4	8

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	PW22.4.2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Pembiayaan penugasan beban mitra tidak akuntabel	Terjadinya pelaporan realisasi keuangan penugasan tidak sesuai dengan yang diterima	1	3	5	1	Memadai	1	2	3
18	PW22.5.1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Adanya resistensi pegawai terhadap perubahan	Pegawai tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal	4	3	16	2	Memadai	2	3	11
19	PW22.5.5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Aplikasi tidak dapat digunakan	Terhambatnya pencapaian perhitungan hasil kinerja	4	3	16	1	Memadai	4	1	6
20	PW22.5.92	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Kegiatan pengawasan terlambat dieksekusi	Hasil pengawasan tidak termanfaatkan dengan optimal	1	3	5	1	Memadai	1	2	3
21	PW22.6.4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Database tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan	Pemrosesan kinerja dan pencapaian nilai kinerja tidak optimal	3	4	17	1	Memadai	1	4	8

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	PW22.6.10	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Kesalahan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi	Kesalahan output aplikasi	2	4	13	1	Memadai	1	4	8
23	PW22.6.19	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Stakeholder tidak siap	Stakeholder kesulitan dalam pemenuhan data dan hasil pengawasan tidak optimal	4	4	19	1	Memadai	2	4	13
24	PW22.6.25	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha (PW)	Terdapat resistensi Mitra Kerja BPKP terhadap perubahan regulasi	Akuntabilitas pengelolaan BUMDes tidak memadai	3	2	10	1	Memadai	3	2	10
25	PW22.5.2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (PW)	Adanya tuntutan hukum terhadap hasil pengawasan	Penurunan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap hasil pengawasan	2	4	13	2	Memadai	1	4	8
26	PW22.5.71	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (PW)	Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/holistis	Kepercayaan Stakeholder terhadap BPKP Menurun	3	4	17	1	Memadai	2	4	13

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	PW22.5.238	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (PW)	Auditan tidak mau melanjutkan tahapan penugasan (FCP, SPIP, MR, dsb) ke tahap berikutnya	Pemerintah Daerah Binaan Perwakilan BPKP yang EPK nya minimal level 3 dibawah target yang ditetapkan	4	2	12	1	Memadai	3	2	10
28	PW22.6.25	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (PW)	Terdapat resistensi Mitra Kerja BPKP terhadap perubahan regulasi	Target Kinerja IEPK untuk Badan Usaha tidak tercapai	3	3	14	1	Tidak Memadai	3	3	14
29	PW22.6.36	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (PW)	Kurangnya Komitmen Pimpinan pada Pemerintah Daerah untuk Mencapai IEPK Level Baik	target kinerja perwakilan tidak tercapai	4	5	24	1	Tidak Memadai	4	4	19
30	PW22.6.36	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (PW)	Kurangnya Komitmen Pimpinan pada Pemerintah Daerah untuk Mencapai IEPK Level Baik	Target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tidak tercapai	3	4	17	1	Memadai	2	4	13

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	PW22.1.12	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Pandemi	Kegiatan Bimtek tidak terlaksana	4	2	12	1	Memadai	3	2	10
32	PW22.1.12	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Pandemi	Kegiatan Bimtek tidak terlaksana	4	2	12	1	Memadai	3	2	10
33	PW22.2.1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Anggaran pengawasan (assurance dan consulting) belum sesuai kebutuhan	Kualitas pengawasan tidak maksimal	3	4	17	2	Memadai	3	2	10
34	PW22.2.7	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Kegiatan di luar Rencana Kerja Tahunan tidak dianggarkan	Kegiatan tidak dilaksanakan/t erlambat dilaksana	3	2	10	1	Memadai	2	2	7

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	PW22.2.11	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Terdapat kegiatan yang belum/kurang dianggarkan dalam DIPA/RKAKL	Kegiatan bimtek tidak dilaksanakan/t erlambat dilaksanakan	3	2	10	1	Memadai	2	2	7
36	PW22.2.16	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Peraturan BPKP tidak tersosialisasikan ke publik	Pencapaian indikator kinerja nilai MRI BLUD tidak tercapai	3	4	17	1	Memadai	2	3	11
37	PW22.3.11	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Pegawai menerima imbalan atas layanan yang diberikan	Kualitas hasil pengawasan tidak memadai	3	3	14	1	Memadai	1	4	8
38	PW22.3.11	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Pegawai menerima imbalan atas layanan yang diberikan	Pegawai memberikan saran yang tidak tepat sasaran	3	3	14	1	Memadai	2	3	11

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	PW22.4.1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	Kualitas hasil pengawasan tidak memadai	4	4	19	1	Memadai	2	3	11
40	PW22.5.5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Aplikasi tidak dapat digunakan	Proses pengelolaan keuangan pemda terhambat	1	3	5	1	Memadai	1	2	3
41	PW22.5.13	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Dukungan teknologi informasi terhadap kegiatan pengawasan kurang maksimal	Kualitas hasil pengawasan tidak memenuhi target	3	4	17	12	Memadai	2	3	11
42	PW22.5.41	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal	Menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap kegiatan consulting BPKP	4	4	19	2	Memadai	2	1	2

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	PW22.5.46	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder	3	4	17	2	Memadai	1	3	5
44	PW22.5.62	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Pengumpulan bukti pemenuhan unsur maturitas SPIP tidak optimal	Maturitas SPIP Pemda belum level 3/Turun	3	4	17	1	Memadai	2	4	13
45	PW22.5.76	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Fasilitator kurang mampu/kompeten dalam melakukan asistensi, workshop dan sosialisasi	target PK APIP level 3 tidak tercapai	3	4	17	1	Memadai	1	4	8
46	PW22.5.78	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Pedoman tidak dipahami pengguna	Tidak tercapainya target kinerja efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	2	3	11	2	Memadai	1	2	3

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	PW22.5.100	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Belum seluruh risikoteridentifikasi secara lengkap	Pencapaian tujuan pemda tidak tercapai	4	4	19	1	Memadai	2	3	11
48	PW22.5.101	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Risiko yang telah diidentifikasi belum seluruhnya dianalisis dengan akurat	Tujuan strategis pemda tidak tercapai	2	3	11	1	Memadai	1	2	3
49	PW22.5.120	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan	Proses perbaikan tata kelola dan kinerja SPI BLU/D tidak dapat dilaksanakan	4	3	16	1	Memadai	2	3	11
50	PW22.5.148	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Terkendalanya koordinasi lintas unit kerja	Rekomendasi tidak tepat	3	4	17	2	Memadai	2	3	11

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	PW22.5.148	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Terkendalanya koordinasi lintas unit kerja	Rekomendasi hasil pengawasan tidak tepat	3	4	17	1	Memadai	2	3	11
52	PW22.5.226	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Komitmen Kepala Daerah dan/atau Pimpinan APIP masih kurang dalam hal peningkatan kapabilitas APIP	Kinerja kapabilitas APIP tidak tercapai	4	4	19	2	Tidak Memadai	3	4	17
53	PW22.5.238	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Auditan tidak mau melanjutkan tahapan penugasan (FCP, SPIP, MR, dsb) ke tahap berikutnya	Target PKPT tidak tercapai	1	3	5	2	Memadai	1	2	3
54	PW22.5.249	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Alokasi sumber daya pengawasan tidak sesuai prioritas	target PK APIP level 3 tidak tercapai	3	4	17	3	Memadai	2	4	13

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	PW22.6.7	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder)	Target Indikator Kinerja Unit terkait Kapabilitas APIP Level 3 tidak tercapai	3	4	17	2	Tidak Memadai	3	3	14
56	PW22.6.7	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder)	Tidak tercapainya Target Kinerja Perwakilan	4	4	19	1	Tidak Memadai	3	3	14
57	PW22.6.17	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Stakeholder terlambat menyampaikan data/tanggapan	Target peningkatan kapabilitas APIP mencapai level 3 tidak tercapai	5	5	25	2	Tidak Memadai	3	4	17
58	PW22.6.18	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data	Tidak dilaksanakannya perbaikan tata kelola dan kinerja SPI BUMD	4	3	16	1	Memadai	2	3	11

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	PW22.6.19	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Stakeholder tidak siap	Target peningkatan kapabilitas APIP mencapai level 3 tidak tercapai	5	5	25	2	Memadai	2	2	7
60	PW22.6.25	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU (PW)	Terdapat resistensi Mitra Kerja BPKP terhadap perubahan regulasi	Tidak terlaksananya perbaikan kinerja dan tata kelola pada BUMD	4	4	19	1	Memadai	2	3	11
61	PW22.1.12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pandemi	Tidak terselenggaranya kegiatan yang dapat mendukung capaian ZI	3	4	17	2	Memadai	2	2	7
62	PW22.1.12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pandemi	Informasi keuangan perwakilan akan kehilangan relevansinya	3	3	14	1	Memadai	2	3	11

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	PW22.1.12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pandemi	Tidak tercapainya peningkatan kompetensi SDM karena tidak terlaksananya bimtek	4	2	12	2	Memadai	3	2	10
64	PW22.1.12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pandemi	Pegawai perwakilan terpapar covid-19	2	2	7	1	Memadai	1	2	3
65	PW22.1.12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pandemi	SPIP unit kerja tidak terlaksana dengan baik	2	2	7	1	Memadai	1	2	3
66	PW22.1.12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pandemi	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja menurun	2	2	7	1	Memadai	1	1	1
67	PW22.2.2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pedoman Pengawasan Sudah Tidak Relevan Untuk Panduan Pelaksanaan Tugas	Pelayanan tata usaha tidak memenuhi standar waktu dan kebutuhan pegawai serta unit kerja	2	2	7	1	Memadai	1	2	3

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	PW22.2.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pedoman Pengawasan Memiliki Mutu Dibawah Ekspektasi	Nilai skor ZI unit kerja belum mencapai target	3	3	14	1	Memadai	2	3	11
69	PW22.2.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pedoman Pengawasan Memiliki Mutu Dibawah Ekspektasi	Kegiatan dalam pencapaian efektivitas SPIP Unit Kerja tidak terlaksana atau terlaksana dengan tidak optimal	1	2	3	1	Memadai	1	1	1
70	PW22.2.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Pedoman Pengawasan Memiliki Mutu Dibawah Ekspektasi	RTP yang dilaksanakan tidak relevan sehingga nilai residual risk masih tinggi	1	2	3	1	Memadai	1	2	3
71	PW22.2.6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Kebijakan eksternal belum sepenuhnya diterapkan/diratifikasi di lingkungan BPKP	Kesalahan penyajian laporan BMN di tingkat satker	2	2	7	1	Memadai	1	2	3

No	Kode Risiko	Nama Sasaran	Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Skor / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Skor / Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Jumlah Pengendalian	Memadai / Tidak Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	PW22.2.6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Kebijakan eksternal belum sepenuhnya diterapkan/diratifikasi di lingkungan BPKP	Kesalahan penyajian laporan BMN di tingkat satker	2	1	2	1	Memadai	1	1	1
73	PW22.2.7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Kegiatan di luar Rencana Kerja Tahunan tidak dianggarkan	Kegiatan tidak dilaksanakan/t erlambat dilaksana	3	2	10	1	Memadai	2	2	7
74	PW22.2.18	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Terdapat perubahan kebijakan eksternal yang tidak tersosialisasikan di lingkungan BPKP	Metode perhitungan penilaian IKPA tidak diketahui	1	2	3	1	Memadai	1	2	3
75	PW22.2.18	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja (PW)	Terdapat perubahan kebijakan eksternal yang tidak tersosialisasikan di lingkungan BPKP	Laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku umum	1	2	3	1	Memadai	1	1	1

BAB IV

PENUTUP





Kualiti Berprestasi



PENUTUP

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja BPKP. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan keempat dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra BPKP 2020-2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari 35 IKK yang diukur pada tahun 2023 sebanyak 34 IKK mencapai kinerja $\geq 100\%$ dan satu IKK mencapai kinerja $<100\%$. IKK capaian tertinggi adalah IKK Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel dengan capaian 2.544%. Sedangkan IKK yang memiliki capaian kurang dari 100% adalah IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah".

Meskipun berbagai strategi telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya pencapaian sasaran program memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan serta mengidentifikasi penyebab. Rencana tindak untuk peningkatan kinerja atas IKK yang belum mencapai target meliputi:

IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Daerah"

Memantau keselarasan perencanaan dan penganggaran setiap tahun dengan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan perencanaan pembangunan nasional

Membangun mekanisme/system informasi yang memadai guna memantau keselarasan perencanaan dan pemenuhan kriteria SMART pada indicator dan target kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah





KILAS PERISTIWA

THROWBACK 2023



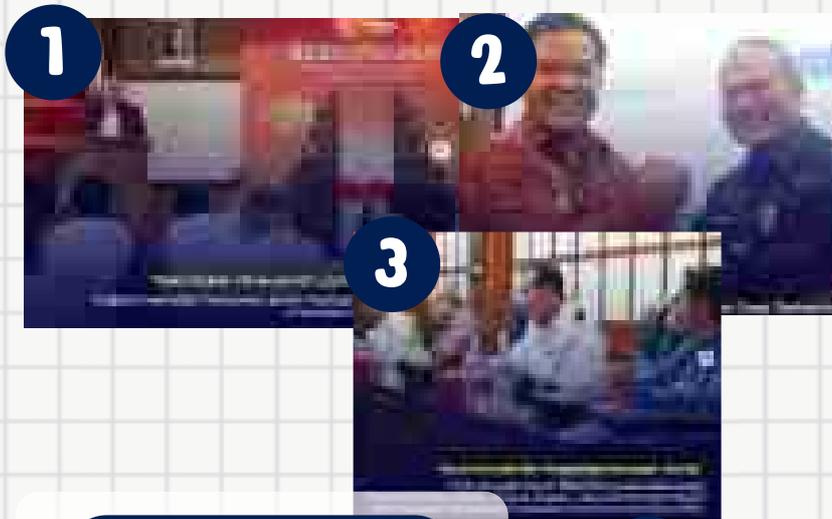
JANUARI

1. Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) di lingkungan Inspektorat Kab Gianyar
2. Rapat Koordinasi Daerah Daerah Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2023 di Aula Gedung Keuangan Negara I Denpasar. Perwakilan BPKP Provinsi Bali mendapatkan peringkat ketiga Kementerian/Lembaga dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil



FEBRUARI

1. Rekonsiliasi Penyusunan Laporan keuangan BPKP Tahun 2022
2. Focus Group Discussion (FGD) tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Menuju Bangli Era Baru yang bertempat di Auditorium Gedung Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli
3. Forum Perangkat Daerah Bidang Pengawasan dalam rangka Penajaman Kinerja, Sasaran, Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 di Ruang Rapat Adhyasta Utama Lantai III Kantor Inspektorat Daerah



MARET

1. Workshop dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
2. Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Lembaga Kerja Sama antar Desa se-Kabupaten Badung
3. Evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan dan penyusunan profil risiko untuk anggaran pemilu dan pemilihan tahun 2023 dan 2024 pada Bawaslu dan KPU Kabupaten Badung, Denpasar, dan Provinsi Bali
4. Workshop Digital Forensik dan TI bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf TI di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bali



APRIL

1. Survei kesiapan UPTD RSUD Gema SANTI Nusa Penida Tahun 2023 dalam penggunaan Aplikasi Forsa BLUD bagi manajerial, staf keuangan, staf IT di lingkungan UPTD RSUD Gema SANTI Nusa Penida
2. Sharing Session "Mengabdikan Sepenuh Hati" yang bertempat di "Saraswati" Library Café





MEI

1. Perwakilan BPKP Bali bekerjasama dengan Universitas Udayana menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema "Mengawal Akuntabilitas untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan"
2. Bimbingan Teknis IGPK pada Pemerintah Kabupaten Karangasem



JUNI

1. Penerapan Manajemen Risiko dalam kegiatan Penyusunan RKA Tahun 2024 TVRI Bali
2. Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema Evaluasi Transformasi Kesehatan di Provinsi Bali

JULI

1. Audit terhadap pembangunan pengamanan pantai yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Bali - Penida di area Pantai Lalanglingah, Tabanan dan Pantai Pengeragoan, Jembrana
2. Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Gianyar dengan tema "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan"



AGUSTUS

1. Pembukaan Musrenbang Polda Bali Tahun 2023 dengan tema "Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Provinsi Bali yang Inklusif dan Berkelanjutan Serta Suksesnya Pengamanan Pemilu 2023"
2. Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bangli dengan tema "Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa."
3. Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Klungkung dengan tema "Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa"
4. Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Embung Tukad Unda



SEPTEMBER

1. Reviu Tunggakan Pembayaran Penataan Kawasan Hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai
2. Kerjasama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
3. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023
4. Audit Atas Laporan Keuangan The Strengthening of National Referral Hospital and Vertical Technical Units Projects- IDN 1031 Pada RSUP Prof DR.I.G.N.G Ngoerah TA 2021 dan 2022



OKTOBER

1. FGD antara Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali tentang Penerapan Pedoman Good Corporate Governance (GCG)
2. Groundbreaking Pembangunan Smart Building Pusdiklatwas BPKP
3. Audit Kinerja atas Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Keagamaan (LPK) pada Kementerian PUP
4. Workshop Tingkat Regional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pengelolaan Keuangan Desa pada Provinsi Bali

NOVEMBER

1. Evaluasi Program Pembangunan Perumahan Rakyat Triwulan IV Tahun 2023 pada Satker Penyediaan Perumahan
2. Evaluasi atas Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi pada Kabupaten Karangasem Tahun 2023
3. Evaluasi atas Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi TW IV 2023



DESEMBER

1. Bimbingan teknis kepada Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar tentang penilaian tingkat maturitas manajemen risiko
2. Evaluasi atas Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Buleleng
3. Reviu atas Pembayaran Carry Over Subsidi Bunga (SB) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Dibayarkan di Tahun Anggaran 2023
4. Monitoring Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Rumah Khusus, Rumah Susun, dan Rumah Swadaya) bersumber dari APBD Tahun 2020-2023 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Bali

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Keuangan			SDM			
			Satuan	Target Revisi	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Program Pengawasan Pembangunan													
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.569	3.361,42	130,85						
		2	Nilai Efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	54.111	160.446,59	296,51						
		3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	42.416	60.614,60	142,90						
Rerata Capaian Saskeg 1							190,09	1.630.619.000	1.628.174.404	99,85	10.626	7.441	70,02
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	4	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	85	100,00	117,65						
		5	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2,00	100,00						
Rerata Capaian Saskeg 2							108,82	476.574.000	474.124.175	99,49	2.650	2.288	86,32

Lampiran II

Lap. No : OT.04/LPP-33/PW22/6/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

Perbandingan Realisasi Outcome 2023 dengan 2020, 2021, dan 2022

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kinerja IKU/IKP/IKK								Target 2024	% realisasi 2023 dari tahun 2024	
				2023		2022		2021		2020				
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
A. Program Pengawasan Pembangunan														
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Dalam juta)	3.361,42	130,85	4.264,46	122,75	6.601,20	304,46	6.097,56	1.499,90	2.710,00	124,04
		1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Dalam juta)	160.446,59	296,51	438.685,45	100,69	455.597,41	203,02	2.256,00	200,89	112.930,00	142,08
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rupiah (Dalam juta)	60.614,60	142,90	5.307,47	689,28	28.319,51	296,44	7.299,53	26,91	51.982,00	116,61
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	100,00	117,65	NA	NA	NA	NA	100	133,33	85	117,65
		2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2	100,00	2	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU	3.1	Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	%	100	125	81	101,56	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	2	200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	66,67
		4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	100	9	100	9	112,5	9	100	9	100,00

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Kinerja IKU/IKP/IKK								Target 2024	% realisasi 2023 dari tahun 2024
					2023		2022		2021		2020			
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
	Usaha	4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	200	2	200	1	100	1	100	1	200,00
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	87	147,46	59	218,52	19	105,56	0	0	38	228,95
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	77	385,00	10	125	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	100	117,65	100	125	100	133,33	75	107,14	90	111,11
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	100,00	1	33,33	NA	NA	NA	NA	4	75,00
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	100,00
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	100,00	1	100	1	100	1	100	1	100,00
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	9	112,50	7	100	5	100	4	66,67	9	100,00
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	100,00	1	100	1	100	1	100	1	100,00
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	9	100,00	9	100	9	100	9	100	9	100,00
		6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	1	100,00	1	100	1	100	N/A	N/A	1	100,00
		6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Desa	5	125,00	3	100	0	0	N/A	N/A	5	100,00

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Kinerja IKU/IKP/IKK								Target 2024	% realisasi 2023 dari tahun 2024
					2023		2022		2021		2020			
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
		6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	APIP	3	30,00	3	75	3	100	3	100	10	30,00
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Pemda	636	2.544,00	636	3180	636	200	636	222,38	0	NA
		6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	180	720,00	30	150	N/A	N/A	N/A	N/A	176	102,27
		6.10	Jumlah BUMD dengan MRI > Level 3	BUMD	5	250,00	1	100	N/A	N/A	N/A	N/A	4	125,00
		6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI ≥ Level 3	BLU/D	12	120,00	3	100	0	0	N/A	N/A	5	240,00
		6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	5	500,00	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	166,67
		6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	3	100,00	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1	300,00
B Program Dukungan Manajemen														
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit	Skor	83,51	111,35	84,44	112,59	85,79	114,39	50,43	67,24	79	106,89
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	83,10	101,34	88,45	107,87	75,86	116,71	N/A	N/A	84	105,3
		7.3	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	%	90,66	129,51	87,42	124,88	75,86	116,71	N/A	N/A	NA	NA
		7.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	%	100,00	100,00	100	100	100	100	N/A	N/A	NA	NA
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	90,12	120,16	90,1	120,13	88,9	118,53	91	130	81	111,23
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95,84	100,88	97,57	102,71	98,16	103,33	99,38	115,56	90	108,41
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	99,86	124,83	95,06	118,83	98	122,5	Baik	100	Baik	NA

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Keuangan			SDM			
			Satuan	Target Revisi	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	6	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	%	80	100,00	125						
Rerata Capaian Saskeg 3							125,00	23.645.000	23.644.770	100,00	108	143	132,41
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	7	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	2	200						
		8	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	100						
		9	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	2	200						
		10	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	59	87	147,46						
		11	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	20	77	385,00						
Rerata Capaian Saskeg 4							206,49	108.504.000	108.449.100	99,95	1.148	1.342	116,90
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	12	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100	100	100,00						
		13	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	85	100	117,65						
		14	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	3	100,00						
		15	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	2	100,00						
Rerata Capaian Saskeg 5							104,41	126.460.000	125.363.450	99,13	1.134	540	47,62

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Keuangan			SDM			
			Satuan	Target Revisi	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	16	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1	1	100,00						
		17	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	8	9	112,50						
		18	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1	1	100,00						
		19	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	9	9	100,00						
		20	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1	1	100,00						
		21	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/Kota	4	5	125,00						
		22	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	10	3	30,00						
		23	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	636	2.544,00						
		24	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	180	720,00						
		25	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	2	5	250,00						
		26	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	10	12	120,00						
		27	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	1	5	500,00						
		28	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	3	3	100,00						
Rerata Capaian Saskeg 6						377,04	1.351.605.000	1.350.652.206	99,93	3.099	1.590	51,31	
Capaian Rerata Saskeg Pengawasan						185,31	3.717.407.000	3.710.408.105	99,81	18.765	13.343	71,11	

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Keuangan			SDM		
			Satuan	Target Revisi	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B Program Dukungan Manajemen												
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	83,51	111,35					
		2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	83,10	101,34					
		3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	%	70	90,66	129,51					
		4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	%	100	100,00	100,00					
		5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	90,12	120,16					
		6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	95,84	100,88					
		7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	99,86	124,83					
Rerata Capaian Sasweg 7						118,09	22.150.999.000	22.090.898.488	99,73	17.126	9.428	55,05
Total						175,71	25.868.406.000	25.801.306.593	99,74	35.891	22.771	63,44

Lampiran III

Lap. No : OT.04/LPP-33/PW22/6/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**TARGET DAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan/Program		Rerata Capaian Sastra	Rincian Output (RO)		Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana	Efisiensi SDM
					Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	190,09	1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan	24	28	116,67	894.767.000	893.155.802	99,82					
			2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Laporan	5	10	200,00	243.505.000	243.046.438	99,81					
			3	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	7	8	114,29	315.558.000	315.545.164	100,00					
			4	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan	6	6	100,00	176.789.000	176.427.000	99,80					
Sub Jumlah Saskeg 1						42	52	123,81	1.630.619.000	1.628.174.404	99,85	10.626	7.441	70,02	Efisien	Efisien
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	108,82	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Laporan	7	9	128,57	281.738.000	280.792.640	99,66					
			6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Laporan	8	8	100,00	91.496.000	90.595.125	99,02					
			7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	Laporan	2	2	100,00	103.340.000	102.736.410	99,42					
Sub Jumlah Saskeg 2						17	19	111,76	476.574.000	474.124.175	99,49	2.650	2.288	86,32	Efisien	Efisien
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada	125,00	8	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan	2	2	100,00	23.645.000	23.644.770	100,00					
			Sub Jumlah Saskeg 3						2	2	100,00	23.645.000	23.644.770	100,00	108	143
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	206,49	9	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Laporan	5	6	120,00	108.504.000	108.449.100	99,95					
			Sub Jumlah Saskeg 4						5	6	120,00	108.504.000	108.449.100	99,95	1.148	1.342
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas	104,41	10	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	Laporan	2	2	100,00	126.460.000	125.363.450	99,13					
			Sub Jumlah Saskeg 5						2	2	100,00	126.460.000	125.363.450	99,13	1.134	540
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas	377,04	11	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Laporan	5	5	100,00	1.244.685.000	1.243.809.998	99,93					
			12	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Laporan	4	4	100,00	106.920.000	106.842.208	99,93					
			Sub Jumlah Saskeg 6						9	9	100,00	1.351.605.000	1.350.652.206	99,93	3.099	1.590
Pengawasan Intern						77	90	116,88	3.717.407.000	3.710.408.105	99,81	18.765	13.343	71,11	Efisien	Efisien
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	118,09	13	Layanan Umum	layanan	1	1	100,00	627.680.000	626.678.777	99,84					
			14	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	100,00	20.444.319.000	20.390.829.711	99,74					
			15	Layanan Sarana Internal	unit	14	14	100,00	79.000.000	75.000.000	94,94					
			16	Layanan Prasarana Internal	unit	8	8	100,00	1.000.000.000	998.390.000	99,84					
Dukungan Pengawasan						24	24	100,00	22.150.999.000	22.090.898.488	99,73	17.126	9.428	55,05	Efisien	Efisien
Total						101	114	112,87	25.868.406.000	25.801.306.593	99,74	35.891	22.771	63,44	Efisien	Efisien

Lampiran IV

Lap. No : OT.04/LPP-33/PW22/6/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**PERBANDINGAN KINERJA OUTPUT KEGIATAN IOK TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI**

Sasaran Kegiatan/Program		Rincian Output (RO)		Kinerja Rincian Output						
				Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (turun)	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)	(turun) Capaian
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan	28	NA	-	116,67	NA	-
		2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Laporan	10	NA	-	200,00	NA	-
		3	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	8	NA	-	114,29	NA	-
		4	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan	6	NA	-	100,00	NA	-
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Laporan	9	NA	-	128,57	NA	-
		6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Laporan	8	NA	-	100,00	NA	-
		7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	Laporan	2	NA	-	100,00	NA	-
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	8	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan	2	NA	-	100,00	NA	-

Sasaran Kegiatan/Program	Rincian Output (RO)		Kinerja Rincian Output							
			Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (turun)	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)	(turun) Capaian	
1	2		3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	9	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Laporan	6	NA	-	120,00	NA	-
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	10	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	Laporan	2	NA	-	100,00	NA	-
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Laporan	5	2	3	100,00	100,00	0,00
		12	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Laporan	4	1	3	100,00	100,00	0,00
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	13	Layanan Umum	layanan	1	1	0	100,00	100,00	0,00
		14	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	0	100,00	100,00	0,00
		15	Layanan Sarana Internal	unit	14	17	(3)	100,00	100,00	0,00
		16	Layanan Prasarana Internal	unit	8	4	4	100,00	100,00	0,00

Lampiran VI

Lap. No : OT.04/LPP-33/PW22/6/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

Tingkat Kesehatan BUMN/Anak Perusahaan/BUMD/BLU di Wilayah Provinsi Bali

No.	Nama BUMN/Anak Perusahaan/BUMD/BLU	Kinerja Tahun 2022		ICORPAC			GCG		Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI			IEPK		
		Nilai	Kategori	Skor	Huruf	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
A. BUMN																	
1	PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	-	-	70,02%	B	BAIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. BUMD																	
1	Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung	3,52	Sehat	-	-	-	82,69	Baik	3	Level 3	Terdefinisi	-	-	-	-	-	-
2	Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli	3,02	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng	3,79	Sehat	-	-	-	-	-	3,09	Level 3	Terdefinisi	-	-	-	-	-	-
4	Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar	3,70	Sehat	-	-	-	-	-	3	Level 3	Terdefinisi	85	Level 3	Integrated	-	-	-
5	Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana	3,10	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem	3,12	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung	2,89	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan	3,66	Sehat	-	-	-	-	-	3	Level 3	Terdefinisi	85	Level 3	Integrated	-	-	-
9	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	4,12	Sehat	-	-	-	88,46	Sangat Baik	100	Level 3	Terdefinisi	-	Level 3 DC	Integrated	-	-	-
10	Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung	51,30	Kurang Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	56,50	Kurang Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5	Level 3	Integrated	-	-	-
12	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	60,20	Kurang Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Perumda Pasar Argha Nayattoma Kabupaten Buleleng	54,70	Kurang Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perumda Gianyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5	Level 3	Integrated	-	-	-
C. BLU																	
1	Universitas Pendidikan Ganesha	98,41	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. BLUD																	
1	RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	100	Level 3	Terdefinisi	-	-	-	-	-	-
2	RS Umum Daerah Kabupaten Klungkung	-	-	-	-	-	-	-	93,18	Level 3	Terdefinisi	100	Level 3	Integrated	-	-	-
3	RSUD Wangaya Kota Denpasar	79,00	Baik	-	-	-	-	-	95,45	Level 3	Terdefinisi	2,33	Level 2	Structured	-	-	-

No.	Nama BUMN/Anak Perusahaan/BUMD/BLU	Kinerja Tahun 2022		ICORPAC			GCG		Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI			IEPK		
		Nilai	Kategori	Skor	Huruf	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
4	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah								95,45	Level 3	Terdefinisi	100	Level 3	Integrated			
5	BLUD RS Jiwa Provinsi Bali								100	Level 3	Terdefinisi	100	Level 3	Integrated			
6	BLUD RSUD Kabupaten Tabanan								3,3	Level 3	Terdefinisi						
7	BLUD RSUD Kabupaten Buleleng								3,53	Level 3	Terdefinisi						
8	BLUD RSUD Kabupaten Bangli								3,01	Level 3	Terdefinisi						
9	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali								81,82	Level 3	Terdefinisi						
10	RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung								81,82	Level 3	Terdefinisi						
11	RS Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar								90,91	Level 3	Terdefinisi						
12	RS Khusus Mata Bali Mandara								81,82	Level 3	Terdefinisi						

Lampiran VII

Lap. No : OT.04/LPP-33/PW22/6/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

Rincian Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beserta tingkat kesehatan/kinerja

No	Nama Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum	Tingkat Kesehatan/kinerja			SPIP		Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI		
		Skor	Huruf	Predikat	Skor	Predika	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BLU												
1	Universitas Pendidikan Ganesha	98,41	Baik				-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
BLUD												
1	RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	-	-				100	Level 3	Terdefinisi	-	-	-
2	RS Umum Daerah Kabupaten Klungkung	-	-				93,18	Level 3	Terdefinisi	10	Level 3	Integrated
3	RSUD Wangaya Kota Denpasar	79,00	Baik				95,45	Level 3	Terdefinisi	8	Level 2	Structured
4	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah						95,45	Level 3	Terdefinisi	9	Level 3	Integrated
5	BLUD RS Jiwa Provinsi Bali						100	Level 3	Terdefinisi	11	Level 3	Integrated
6	BLUD RSUD Kabupaten Tabanan						3,3	Level 3	Terdefinisi			
7	BLUD RSUD Kabupaten Buleleng						3,53	Level 3	Terdefinisi			
8	BLUD RSUD Kabupaten Bangli						3,01	Level 3	Terdefinisi			
9	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali						81,82	Level 3	Terdefinisi			
10	RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung						81,82	Level 3	Terdefinisi			
11	RS Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar						90,91	Level 3	Terdefinisi			
12	RS Khusus Mata Bali Mandara						81,82	Level 3	Terdefinisi			

Lampiran VIII

Lap. No : OT.04/LPP-33/PW22/6/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

Rincian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta tingkat kesehatan/kinerja dan predikatnya

No	Nama Badan Usaha Milik Daerah	Tingkat Kesehatan/kinerja			Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI		
		Skor	Huruf	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung	3,52	Sehat		3	Level 3	Terdefinisi	-	-	-
2	Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli	3,02	Sehat		-	-	-	-	-	-
3	Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng	3,79	Sehat		3,09	Level 3	Terdefinisi	-	-	-
4	Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar	3,70	Sehat		3	Level 3	Terdefinisi	0	Level 3	Integrated
5	Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana	3,10	Sehat		-	-	-	-	-	-
6	Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem	3,12	Sehat		-	-	-	-	-	-
7	Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung	2,89	Sehat		-	-	-	-	-	-
8	Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan	3,66	Sehat		3	Level 3	Terdefinisi	0	Level 3	Integrated

No	Nama Badan Usaha Milik Daerah	Tingkat Kesehatan/kinerja			Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI		
		Skor	Huruf	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	4,12	Sehat		100	Level 3	Terdefinisi		Level 3 DC	Integrated
10	Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung	51,30	Kurang Sehat							
11	Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	56,50	Kurang Sehat					0	Level 3	Integrated
12	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	60,20	Kurang Sehat							
13	Perumda Pasar Argha Nayattoma Kabupaten Buleleng	54,70	Kurang Sehat							
14	Perumda Gianyar							0	Level 3	Integrated

Lampiran IX

Lap. No : OT.04/LPP-33/PW22/6/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**Rincian kualitas tata kelola Pemda Provinsi yang mencakup
Maturitas SPIP, Kapabilitas APiP, Manajemen Risiko, dan IEPK**

No.	Nama Pemda	SPIP			Kapabilitas			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	Provinsi Bali	3,298	3	Terdefinisi	3.250	3	<i>Delivered</i>	3,313	3	<i>Risk Defined</i>	3,000	3	

Lampiran X

Lap. No

: OT.04/LPP-33/PW22/6/202

Tanggal

: 3 Januari 2024

Rincian kualitas tata kelola Pemda Kabupaten/Kota yang mencakup Maturitas SPIP, Kapabilitas APiP, Manajemen Risiko, dan IEPK

No.	Nama Pemda	SPIP			Kapabilitas			MR			IEPK	
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level
1	Kota Denpasar	3,432	3	Terdefinisi	3,120	3	<i>Delivered</i>	3,293	3	<i>Risk Defined</i>	2,915	2
2	Kabupaten Badung	3,161	3	Terdefinisi	3,060	3	<i>Delivered</i>	2,97	2	<i>Risk Aware</i>	2,781	2
3	Kabupaten Tabanan	3,178	3	Terdefinisi	3,020	3	<i>Delivered</i>	3,094	3	<i>Risk Defined</i>	2,640	2
4	Kabupaten Klungkung	3,135	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	3,000	3	<i>Risk Defined</i>	2,856	2
5	Kabupaten Gianyar	3,138	3	Terdefinisi	3,10	3	<i>Delivered</i>	3,000	2	<i>Risk Aware</i>	2,910	2
6	Kabupaten Buleleng	3,141	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	2,995	2	<i>Risk Aware</i>	2,599	2
7	Kabupaten Jembrana	3,036	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	2,840	2	<i>Risk Aware</i>	2,858	2
8	Kabupaten Karangasem	3,045	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	2,981	2	<i>Risk Aware</i>	2,755	2
9	Kabupaten Bangli	3,16	3	Terdefinisi	3,02	3	<i>Delivered</i>	3,030	2	<i>Risk Defined</i>	2,870	2



Kreatif Berprestasi



8. Address: info@bentley.com
Bentley Systems, Inc.



www.bentley.com



<https://www.instagram.com/bentley>